



PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA)



Drs. H. DEPRI PONTOH
BUPATI


Drs. H. AMIN LASENA, M.AP
WAKIL BUPATI

TAHUN
ANGGARAN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	11
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	10
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara	13
	3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	13
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022	16
	4.2. Target Pendapatan Daerah	28
	4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
	4.2.2. Pendapatan Transfer	28
	4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023	30
	5.2. Rencana Belanja Daerah	53
	5.2.1. Belanja Operasi	53
	5.2.2. Belanja Modal	53
	5.2.3. Belanja Transfer	54
	5.2.4. Belanja Tidak Terduga	55
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	57
BAB VIII	PENUTUP	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang dipedomani adalah pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

f. Strategi pencapaian.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini RKPD Tahun 2023 dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini disusun dengan memuat sinkronisasi kebijakan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD yang telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah:

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;

4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103);
- 14) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 18).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian secara luas. Pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat, perubahan orientasi belanja/redistribusi pendapatan serta penurunan pada hampir seluruh aspek kehidupan. Berbagai dampak tersebut berpengaruh pada gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022, dan diprediksi juga masih menunjukkan dampaknya pada tahun 2023. Hal tersebut juga mempengaruhi rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dapat dilihat dari nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Besaran PDRB tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta investasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2021 sebesar Rp1,749 (triliun). Sampai dengan tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 44,66%. Kontribusi sektor lainnya yakni konstruksi sebesar 14%, pertambangan dan penggalian sebesar 11,76%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,63%, industri pengolahan sebesar 3,29%, real estate 3,02% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3,24%. Adapun PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut kategori lapangan usaha tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	662,733.10	692,168.90	79,371.53	748,004.40	753.273.62
Pertambangan dan Penggalian	167,426.10	180,094.80	194,985.54	198,697.20	212.230.64
Industri Pengolahan	50,630.80	54,279.90	57,085.88	57,566.00	61.209.85
Pengadaan Listrik dan Gas	854.80	888.60	937.60	977.40	1.018.16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,134.30	4,370.30	4,457.67	4,589.20	4.850.76
Konstruksi	237,093.00	256,900.30	272,135.15	261,323.80	275.184.42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	171,143.20	182,931.30	198,633.91	196,242.60	207.517,88
Transportasi dan Pergudangan	16,888.50	18,099.90	19,813.62	18,496.60	18.713,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,103.60	4,427.10	4,800.64	4,559.40	4.763,44
Informasi dan Komunikasi	8,455.60	9,315.40	9,613.47	10,764.60	11.126,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,278.20	15,709.70	16,034.07	17,253.10	18.101,36
Real Estate	48,157.90	51,814.50	55,495.13	55,134.40	57.091,68
Jasa Perusahaan	175.80	189.70	207.70	209.20	219,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	46,427.30	49,167.60	49,154.28	48,823.70	51.299,09
Jasa Pendidikan	30,119.80	32,539.30	34,820.21	35,538.80	37.308,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,547.40	17,069.20	18,605.41	20,462.60	22.617,31
Jasa Lainnya	10,354.10	11,680.20	13,062.19	12,423.50	13.035,93
PDRB	1.489.523,4	1.581.646,6	1.679.206,6	1.691.090,5	1.749.562,8

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2021 kembali mulai stabil di dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan Ekonomi 3,46% setelah sempat terpuruk pada angka 0,71% pada tahun 2020. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai mana amanat misi ketiga RPJMD yang menitik beratkan pada potensi unggulan daerah (pertanian, perikanan dan pariwisata) cukup mampu untuk melewati masa pandemi covid 19 yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah

diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2017 s/d tahun 2021.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori/Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2021

No.	Kategori	Pertumbuhan (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.01	4.44	5.37	2.55	0.70
2.	Pertambangan dan Penggalian	7.53	7.57	8.27	1.90	6.81
3.	Industri Pengolahan	9.56	7.21	5.17	0.84	6.33
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.88	3.95	5.51	4.24	4.17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	5.71	2.00	2.95	5.70
6.	Konstruksi	10.17	8.35	5.93	(3.97)	5.30
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.48	6.89	8.58	(1.20)	5.75
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.83	7.17	9.47	(6.65)	1.17
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.18	7.88	8.44	(5.03)	4.48
10.	Informasi dan Komunikasi	6.05	10.17	3.20	11.97	3.22
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.93	2.82	2.06	7.60	4.92
12.	Real Estate	8.81	7.59	7.10	(0.65)	3.55
13.	Jasa Perusahaan	8.99	7.91	9.49	0.72	4.88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.73	5.90	(0.03)	(0.67)	5.07
15.	Jasa Pendidikan	6.44	8.03	7.01	2.06	4.98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.13	9.79	9.00	9.98	10.48
17.	Jasa Lainnya	8.41	12.81	11.83	(4.89)	4.93
	Pertumbuhan Ekonomi	6.28	6.18	6.17	0.71	3.46

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 5,3 - 5,9 persen.

Mengantisipasi dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih serta dampak inflasi akibat kebijakan fiskal pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif

dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount - relaksasi kredit.

Upaya pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan, Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis, Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa serta pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2018-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 masih dalam tahap penyusunan akhir sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah

akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah; 3) transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan; 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; 2) belanja modal yang terdiri dari, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya; 3) belanja tak terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 telah dilakukan telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi yang berdampak dan harus dipedomani daerah, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraph 3 Pasal 159 dan Pasal 160.

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut di atas memiliki makna dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. tema indikatif rencana kerja tahun 2023 adalah: “Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Ketujuh prioritas RKP tersebut kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) arah kebijakan RKPD untuk tahun 2023, sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan);
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah carbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan ibukota Negara.

Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2023 perlu adaptif dan responsif terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2023. Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

- a). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 persen;
- b). Laju inflasi sebesar 2,0 - 4,0 persen;
- c). Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 persen;
- d). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31 - 73,49 point;
- e). Rasio Gini sebesar 0,375-0,378 point;
- f). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3-6,0 persen.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD PROVINSI SULAWESI UTARA

Tema pembangunan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sdm Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan. Tema tersebut merupakan arah kebijakan tahunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026. Untuk mendukung pelaksanaan tema tersebut, Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, yaitu:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
4. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas;
5. Pembangunan kepariwisataan;
6. Penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim;
7. Peningkatan kualitas tata pemerintahan;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW UTARA

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan "*Penguatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi serta Layanan Dasar yang Berkualitas Untuk Ketahanan Daerah*" dengan menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, yakni:

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai pertumbuhan yang ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Utara juga dapat menikmati kenaikan pendapatan sebagai akibat dari meningkatnya kualitas pengelolaan potensi unggulan daerah (pertanian, perikanan dan pariwisata);
2. Layanan dasar yang berkualitas yaitu pengembangan sektor yang masih menjadi persoalan utama daerah (pendidikan, kesehatan dan reformasi

birokrasi). Disamping itu, pemantapan sarana dan prasarana dasar juga menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bolaang Mongondow Utara;

3. Ketahanan daerah adalah sebuah kondisi di mana masyarakat Bolaang Mongondow Utara mampu bertahan terhadap dampak ekonomi dan sosial yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini telah memasuki gelombang ke-4.

Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi potensi unggulan yang ada di Bolaang Mongondow Utara, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdampak Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yaitu:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan daya saing produk lokal;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Perda Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 dalam penyusunan APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 67,83 poin;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,92 persen;
3. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,10 persen;

4. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 3,63 persen;
5. Gini Ratio, dengan target 0,33 point;
6. Angka Harapan Hidup, dengan target 68,34 tahun;
7. Harapan Lama Sekolah, dengan target 11,94 tahun;
8. Rata – rata lama sekolah, dengan target 8,55 tahun; dan
9. Pengeluaran Perkapita Riil disesuaikan, dengan target 9,92 juta rupiah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan belum puih sepenuhnya, secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian secara luas. Pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat, perubahan orientasi belanja/redistribusi pendapatan serta penurunan pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Berbagai dampak tersebut berpengaruh pada gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022, dan diprediksi juga masih menunjukkan dampaknya pada tahun 2023. Hal tersebut juga mempengaruhi rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Ekonomi pada tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Utara Relatif lebih stabil di bandingkan dengan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara maupun Ekonomi Nasional secara umum. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow utara yang masi berada pada level aman sebagai mana kita ketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami kontraksi pada level -0,99% bahkan laju pertumbuhan ekonomi Nasional terpuruk jauh pada level -2,07% fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai mana amanat misi ketiga RPJMD yang menitip beratkan pada potensi unggulan Daerah (pertanian,perikanan dan pariwisata) cukup mampu untuk melewati masa pandemic covid 19 yang saat ini telah memasuki tahap golongan ke IV (Omicron).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2023

Perkembangan ekonomi global di tahun 2023 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
3. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Percepatan dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah: Pajak Kendaraan Bermotor atas alat berat yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017; Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

- d) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan penanganan, sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten;
- e) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

2. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Jasa giro;
- b. Pendapatan bunga;

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri atas objek;

- a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari pajak

Pendapatan DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Mineral dan Batubara;
- DBH-Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDH Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana DBH Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan DBH-SDA kecuali DBH-SDA mineral dan batubara, panas bumi dan perikanan pada Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA

kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, panas bumi dan perikanan Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun anggaran 2023.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus

Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.

1) DAK Fisik

Penganggaran dan penggunaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.

Bidang Pendidikan, kegiatan peningkatan prasarana

pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu: satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertanian, kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola pada karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:

- 2) DAK fisik pada bidang/sub bidang yang output belum tercapai, yaitu: untuk sisa DAK fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023; atau untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- 3) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada: bidang/subbidang yang sama ditahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah ditahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

4) DAK Nonfisik

Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu: penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN

Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2023.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK - 23 - Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

b. Dana Desa (DD)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

2. Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp13.235.370.910,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.074.120.910,00 atau 38,34 persen dari total target PAD tahun 2023;
2. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4,211,250,000.00 atau 31,82 persen dari total target PAD tahun 2023; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp3.950.000.000,00 atau 29,84 persen dari total target PAD tahun 2023.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp352.759.173.677,00, yang bersumber dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU dan DBH Pusat) sebesar Rp338.886.745.038,00 atau 96,07 persen dari total target pendapatan transfer tahun 2023.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi) sebesar Rp13.872.428.639,00 atau 3,93 persen dari total target pendapatan transfer tahun 2023.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan, Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 dihitung dengan berdasar proyeksi pada Rancangan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Proyeksi belanja daerah belum menargetkan pendapatan yang bersifat dinamis (DAK, DID, DD, dll) sehingga diproyeksikan turun sebesar 41,88 persen dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Perhitungan gaji pegawai diproyeksikan naik sebesar 3,6 persen dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5449 Tahun 2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ Tahun 2019.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
2. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
3. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
5. Peningkatan skill calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha;

6. Mendorong pemulihan aktifitas perekonomian melalui optimalisasi potensi produk unggulan daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai

ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- i. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan - 35 - urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - 4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
 - v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - b) Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu
 - i) sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
 - ii) dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:

- merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah
- iii) Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- i) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii) mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii) pemberian sanksi administratif berupa penundaan

- pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
- iv) mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- i) Permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii) berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - iv) berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada

Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.

- 8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
- Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi: Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

- Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan: menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa, serta PNPNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan: Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum

dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain: Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga

puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Pemeliharaan:

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan

masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
- Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- penghargaan atas suatu prestasi;
- pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib

dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- 3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali: kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; partai politik dan/atau; ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- 5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta

monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: individu; keluarga; kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai

aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada: perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut

pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer digunakan pada SKPD selaku SKPKD.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPB yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. RENCANA BELANJA DAERAH

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp280.284.294.299,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp228.484.045.698,00 telah mempertimbangkan pengalihan CPNS ke PNS tahun 2022 ke PNS serta asumsi gaji dan tunjangan yang didasarkan pada target APBD tahun 2022;
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp44.853.025.749,00 dimana didalamnya belum termasuk belanja dari sumber pendanaan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Sedangkan untuk Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp6.947.222.852,00 terdiri dari Hibah KPU sebesar Rp6.250.000.000,00 dan Hibah Parpol sebesar Rp627.222.528,00 serta Hibah Pilsang sebesar Rp70.000.324,00 untuk tahun 2023.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp77.943.951.359,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp77.943.951.359,00;

2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunagedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00;
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00;
4. Belanja Aset Tetap Lainnya adalah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan/pembangunan pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah, dan untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00.

Kesemua belanja modal dimaksud diatas belum termasuk belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan dana yang bersifat dinamis lainnya.

5.2.3. Belanja Transfer

Belanja transfer tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp37.204.454.459,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan

daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dengan alokasi sebesar Rp928.537.091,00 untuk tahun anggaran 2023;

2. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untukmenggambarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus daripemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota,pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuankeuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa danpemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalamrangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Untuk alokasinyasendiri direncanakan sebesar Rp36.275.917.368,00.

Kedua belanja dimaksud masih memungkinkan mengalami perubahan seiring perubahan alokasi dana transfer (DAU dan DBH Pusat) ke daerah oleh pemerintah pusat dan DBH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.004.522.067,00, didasarkan pada rencana belanja tidak terduga yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2023 adalah Rp0,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 5,3 – 5,9 persen, asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau resiko kebawah.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi pasca COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount - relaksasi kredit;
3. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;
4. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, rencana pembangunan PLTU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu :

1. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional;

2. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas;
3. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
4. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber- sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
5. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi kepadat modal dan teknologi;
6. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19;
7. Masih lesunya investasi dan ketergantungan terhadap investasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya daya saing produk unggulan daerah terutama padaproduk unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;
8. Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur trans sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah.
9. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
10. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber- sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
11. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun

domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi kepadatan modal dan teknologi;

12. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19;
13. Masih lesunya investasi dan ketergantungan terhadap investasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya daya saing produk unggulan daerah terutama padaproduk unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;
14. Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur trans sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah,

mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal;

6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis;
7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa.

Dari sisi keuangan daerah, Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2023. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya yaitu memperbaiki data perpajakan dengan validasi bagi pembayar pajak dan retribusi daerah; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan untuk didanai oleh DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait melalui SIMLARAS;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
4. Mendorong upaya peningkatan pajak yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
5. Menetapkan regulasi tentang retribusi daerah potensial.

BAB VIII PENUTUP

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SILPA maka akan segera dilakukan penyesuaian APBD Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Boroko, Juli 2022

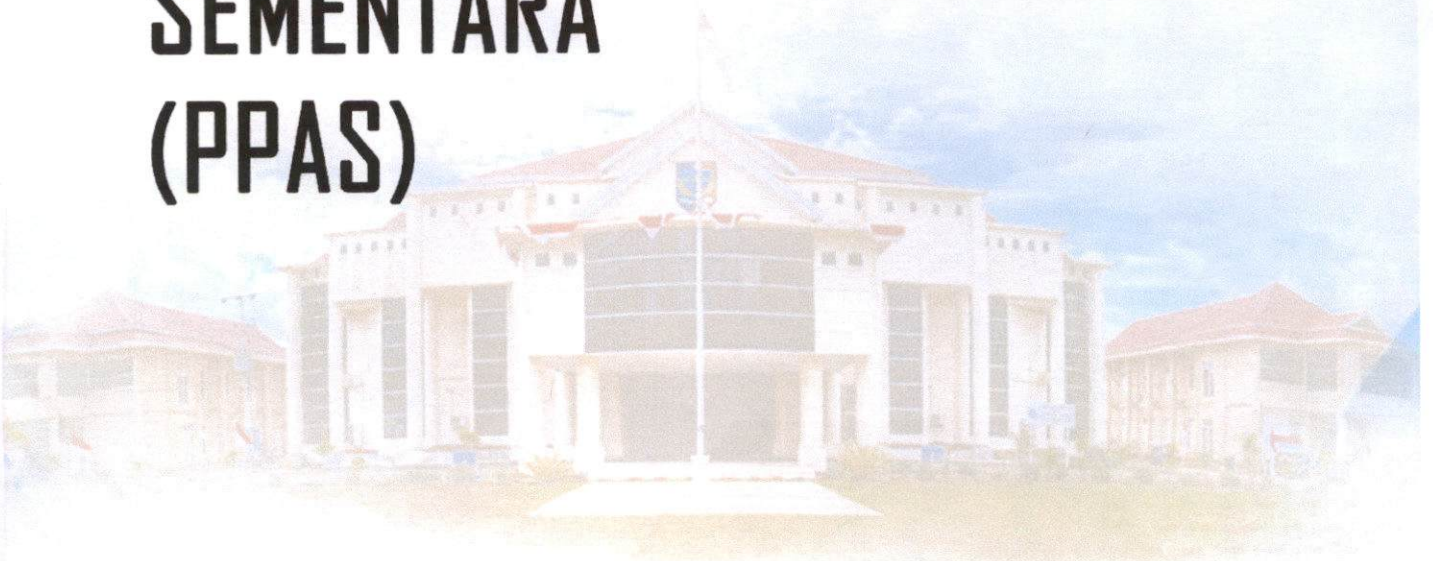
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA





PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

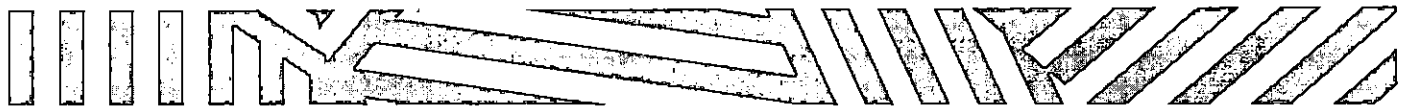
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)



Drs. H. DEPRI PONTOH
BUPATI

Drs. H. AMIN LASENA, M.AP
WAKIL BUPATI

TAHUN ANGGARAN **2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL		
BAB I	PENDAHULUAN	i
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	i
	1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	i
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS	i
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	96
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	97
BAB VI	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah	4
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	8
Tabel 3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara	35
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	40
Tabel 3.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	96
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	97
Lampiran	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan SKPD dan program/kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA pada SKPD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

PPAS disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PPAS

Adapun dasar (hukum) penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 18).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp13.235.370.910,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.074.120.910,00 atau 38,34 persen dari total target PAD tahun 2023;
2. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4.211.250.000,00 atau 31,82 persen dari total target PAD tahun 2023; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp3.950.000.000,00 atau 29,84 persen dari total target PAD tahun 2023.

Target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp352.759.173.677,00, yang bersumber dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU dan DBH Pusat) sebesar Rp338.886.745.038,00 atau 52,50 persen dari total target pendapatan transfer tahun 2022 dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
2. Pendapatan Transfer Antar-Daerah (DBH Provinsi) sebesar Rp13.872.428.639,00 atau 2,15 persen dari total target pendapatan transfer tahun 2022.

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.235.370.910,00	
4.1.01	Pajak Daerah	5.074.120.910,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.211.250.000,00	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	3.950.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	352.759.173.677,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	338.886.745.038,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.872.428.639,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	375.994.544.587,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	0,00	

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2023 adalah Rp0,00..

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto) sebagaimana dirinci pada bagian sebelumnya, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp375.994.544.587,00. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Operasi sebesar Rp280.284.294.299,00, Belanja Modal sebesar Rp77.943.951.359,00, belanja tak terduga sebesar Rp1.004.522.067,00 dan Belanja Transfer Rp37.204.454.459,00,00. Berdasarkan perhitungan total penerimaan daerah dimaksud, kemudian didistribusi untuk membiayai program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 adalah: *"Penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi serta layanan dasar yang berkualitas untuk ketahanan daerah"*. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, yakni :

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan daya saing produk lokal;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Akselerasi implementasi reformasi birokrasi.

Di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 67,83 poin;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,92 persen;
3. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,10 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 3,63 persen;
5. Gini Ratio, dengan target 0,33 poin;
6. Angka Harapan Hidup, dengan target 68,34 tahun;
7. Harapan Lama Sekolah, dengan target 11,94 tahun;
8. Rata-rata Lama Sekolah, dengan target 8,55 tahun; dan
9. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan, dengan target 9,92 juta rupiah.

Untuk menjaga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah, maka penyusunan KUA/PPAS pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam table sebagai berikut :

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Indeks Ketersediaan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Indeks Pemanfaatan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Indeks Pemanfaatan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Presentase Pangan Yang Aman dikonsumsi		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Presentase Pangan Yang Aman dikonsumsi		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT dan Volume Usahanya		
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT dan Volume Usahanya		
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
			Persentase peningkatan produktifitas UMKM		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase peningkatan produktifitas UMKM		
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah produksi perikanan budidaya		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase pengolahan hasil perikanan		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas lahan yang dikelola menggunakan alsintan (Ha)		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas lahan yang dikelola menggunakan alsintan (Ha)		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ternak Berpenyakit		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Ternak Berpenyakit		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Luas Areal yang terserangan OPT menurun (Ha)		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Luas Areal yang terserangan OPT menurun (Ha)		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Penyuluh yang menerapkan Teknologi Tepat Guna		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Penyuluh yang menerapkan Teknologi Tepat Guna		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK SMP/ MTs/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK SMP/ MTs/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APM SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APM SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APM SMP/ MTs/ sederajat		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APM SMP/ MTs/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Kelompok sasaran masyarakat (Bayi, Balita, Anak Sekolah, Anak Remaja, Ibu Hamil dan Ibu Nifas) Mendapat Intervensi Gizi		
				DINAS KESEHATAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Kelompok sasaran masyarakat (Bayi, Balita, Anak Sekolah, Anak Remaja, Ibu Hamil dan Ibu Nifas) Mendapat Intervensi Gizi		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			persentase Operasional pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			persentase Operasional pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Presentase Pemenuhan Indikator SPM Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes dan ODGJ Sesuai Standar)		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Presentase Pemenuhan Indikator SPM Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes dan ODGJ Sesuai Standar)		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang diberdayaaktifkan dalam penyelenggaraan Kessos		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang diberdayaaktifkan dalam penyelenggaraan Kessos		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang menerima Bansos Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang menerima Bansos Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana Yg Menerima Bansos Dalam Masa Tanggap Darurat.		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana Yg Menerima Bansos Dalam Masa Tanggap Darurat.		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Pelatihan		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Pelatihan		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Tertangani		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Tertangani		
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD		
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase kasus kekerasan yang terselesaikan		
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak		
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Presentase perizinan yang memanfaatkan aplikasi		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Presentase perizinan yang memanfaatkan aplikasi		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Pemuda Yang Memiliki Keterampilan		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Pemuda Yang Memiliki Keterampilan		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Kejuaraan Yang Diraih		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Kejuaraan Yang Diraih		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			memenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase administrasi umum perangkat daerah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase pengadaan barang milik daerah		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah produksi perikanan budidaya		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase pengolahan hasil perikanan		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah event wisata		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah event wisata		
				DINAS PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Warga Transmigrasi Yang Terlatih		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Warga Transmigrasi Yang Terlatih		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan kerjasama		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan kerjasama		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			persentase kebutuhan pegawai dan pengembangan karir pegawai		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			persentase kebutuhan pegawai dan pengembangan karir pegawai		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN berkompeten		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase penyampaian laporan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase penyampaian laporan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Presentase kebijakan yang dilaksanakan dengan baik		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Presentase kebijakan yang dilaksanakan dengan baik		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase penanganan laporan trantibnas		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Presentase penanganan laporan trantibnas		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase jenis kebudayaan yang dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase jenis kebudayaan yang dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Jumlah data sejarah daerah yang ditata		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Jumlah data sejarah daerah yang ditata		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah cagar budaya yg dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah cagar budaya yg dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase masyarakat yang memahami idielogi Wasbang		
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase sumber air / Sungai berkondisi baik dan kondisi debit air stabil/ Jaringan Irigasi Baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase sumber air / Sungai berkondisi baik dan kondisi debit air stabil/ Jaringan Irigasi Baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase Pemenuhan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan berkondisi baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Presentase Pengurangan Luasan Genangan Banjir		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase Pemenuhan Trotoar dan Jalan Permukiman		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase Pemenuhan Trotoar dan Jalan Permukiman		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase Bangunan Kawasan Lingkungan Berkondisi Baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase Bangunan Kawasan Lingkungan Berkondisi Baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Rasio Rumah Layak Huni		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Permukiman Kumuh Tertangani		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Kinerja Aparatur Desa sesuai target		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Kinerja Aparatur Desa sesuai target		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
				Persentase pengembangan dan penataan pasar rakyat	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
				Persentase pengembangan dan penataan pasar rakyat	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				Persentase ketersediaan bahan pokok penting lainnya yang dipasar murahkan	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				Persentase ketersediaan bahan pokok penting lainnya yang dipasar murahkan	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				Persentase Perlindungan Konsumen	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				Persentase Perlindungan Konsumen	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
				Persentase pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
				Persentase pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
				Persentase standar kompetensi industri	
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
				Persentase standar kompetensi industri	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			terlaksannya kegiatan pemerintahan		
			KECAMATAN PINOGALUMAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			terlaksannya kegiatan pemerintahan		
			KECAMATAN PINOGALUMAN		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Presentase laporan LPPD tepat waktu		
			KECAMATAN PINOGALUMAN		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Presentase laporan LPPD tepat waktu		
			KECAMATAN PINOGALUMAN		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan Penanggulangan Bencana		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang tersusun		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Kualitas Air dalam kategori Baik		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
			Kualitas Udara dalam kategori baik		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
			Kualitas Udara dalam kategori Baik		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Luas Kawasan Tutupan Lahan		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase Capaian Kegiatan Peduli Lingkungan		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Pengelolaan Sampha		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase Pengelolaan Sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Persentase Kawasan Konservasi SDA		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakkan Perkada		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda		
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda		
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Jumlah minat investasi		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Jumlah minat investasi		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Peresntase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Peresntase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		
			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
			Tersedianya penunjang administrasi kepegawaian		
			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
			Tersedianya penunjang administrasi keuangan		
			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
			Tersedianya penunjang pengadaan barang milik daerah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Tersedianya penunjang penyediaan jasa urusan pemerintahan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Tersedianya penunjang administrasi umum		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase capaian kinerja SKPD		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Batas maksimal defisit APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Batas maksimal defisit APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Kualitas penyajian Laporan Keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Kualitas penyajian Laporan Keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Dokumen SP2D yang berhasil posting		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Dokumen SP2D yang berhasil posting		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase kegiatan koordinasi pendampingan asistensi monitoring dan evaluasi		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Presentase kegiatan koordinasi pendampingan asistensi monitoring dan evaluasi		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase penanganan laporan trantibnas		
				KECAMATAN PINOGALUMAN	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan		
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
78	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	184.000.000
79	PENINGKATAN KUALITAS SDM				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	128.400.000
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	128.400.000
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.200.000
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	128.400.000
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.200.000
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.200.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			APK PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			APK SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			APK SMP/ MTs/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			APM SD/ MI/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			APM SMP/ MTs/ sederajat		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.187.892.037
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Kejuaraan Yang Diraih		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.999

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Kejuaraan Yang Diraih		
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113.543.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase jenis kebudayaan yang dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	112.500.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah cagar budaya yg dikelola		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	173.176.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	274.122.840
80	PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH				
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			

				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	23.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	111.152.800
81	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.255.364.998

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.781.787.565
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Rasio Rumah Layak Huni		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	42.578.258
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Permukiman Kumuh Tertangani		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	42.578.258
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.513

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.512
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS PERHUBUNGAN	6.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			ersentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	20.000.000
			Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	93.893.400
			Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	212.500.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	100.000.000
84	PENINGKATAN KUALITAS TATA PEMERINTAHAN				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				SEKRETARIAT DPRD	18.257.258.855
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

				SEKRETARIAT DPRD	818.006.000
85	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				DINAS PARIWISATA	2.128.692.670

				SEKRETARIAT DAERAH	12.945.253.854

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			

				SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

				SEKRETARIAT DAERAH	150.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	75.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	850.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase capaian kinerja SKPD		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	34.986.152.700
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Batas maksimal defisit APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Kualitas penyajian Laporan Keuangan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
			Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	37.532.454.459
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Presentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	244.000.000
			Presentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	244.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	244.000.000
			Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	244.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Presentase Peningkatan Pajak Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	403.000.000
			Presentase Peningkatan Retribusi Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	403.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				INSPEKTORAT DAERAH	650.390.800
			Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Persentase kelengkapan administrasi keuangan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Presentase penyampaian laporan		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran		
				KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	75.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase masyarakat yang memahami ideologi Wasbang		
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.000.000

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Meningkatkan daya saing produk lokal					
		2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran					
					DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.000.000	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	279.378.111	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					

					DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	23.000.000	
2		Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi					
		2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.000.000	
		Persentase kelengkapan administrasi keuangan					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.000.000	
		Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Batas maksimal defisit APBD					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
		Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
		Kualitas penyajian Laporan Keuangan					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
		Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
				Presentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
				Presentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
				Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.203.953.052	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Presentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	310.000.000	
				Presentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	310.000.000	
				Presentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	310.000.000	
				Presentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	310.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Presentase Peningkatan Pajak Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	806.000.000	
				Presentase Peningkatan Retribusi Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	806.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					SEKRETARIAT DAERAH	13.656.194.839	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

					SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					SEKRETARIAT DAERAH	150.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					SEKRETARIAT DPRD	17.605.208.855		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					

					SEKRETARIAT DPRD	25.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	34.986.152.700		
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia							
		1.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			APK PAUD					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			APK SD/ MI/ sederajat					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			APK SMP/ MTs/ sederajat					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			APM SD/ MI/ sederajat					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			APM SMP/ MTs/ sederajat					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.233.285.074		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase jenis kebudayaan yang dikelola					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	225.000.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar budaya yg dikelola					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	346.352.200	
		2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	23.840.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase kelengkapan administrasi kepegawaian			
					DINAS PARIWISATA	4.257.385.339	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.700.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Presentase capaian kinerja SKPD			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Batas maksimal defisit APBD			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Kualitas penyajian Laporan Keuangan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Presentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Presentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Presentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
				Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran			
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	548.245.680	
					INSPEKTORAT DAERAH	1.300.781.600	
		2.1.2. Meningkatnya pelayanan publik					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
		Persentase Kejuaraan Yang Diraih					
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.999	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
		Persentase Kejuaraan Yang Diraih					
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113.543.600	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.781.787.565	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
		Rasio Rumah Layak Huni					
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	42.578.258	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
		Persentase Permukiman Kumuh Tertangani					
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	42.578.258	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
		Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan					
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.513	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Cakupan Penanggulangan Bencana					
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	66.888.685	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan					
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.512	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERHUBUNGAN	6.500.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				ersentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan prasarana Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	20.000.000		
				Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	93.893.400		
				Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	422.508.120		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	500.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					SEKRETARIAT DAERAH	3.517.074.536		
					SEKRETARIAT DPRD	652.050.000		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					

					SEKRETARIAT DPRD	818.006.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	75.000.000		

					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.000.000		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase masyarakat yang memahami ideologi Wasbang				
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan				
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.947.222.528		
4	Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran							
		1.1.4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
		Persentase pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	192.000.000	
		2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran					
					DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	218.305.600	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
		Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama					
					SEKRETARIAT DAERAH	100.000	
		3.1.1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah (lokal)					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
		Jumlah produksi perikanan tangkap					
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	184.000.000	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.145.364.998	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Kebiasaan Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN	100 Porsen	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			
		Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Porsen				Terbayarnya tunjangan penghasilan ASN dan gaji ASN	100 persen			
						1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 persen			
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/ workshop/ pelatihan dan sejenisnya	100 persen	Semua Kab/Kota		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
							Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen			
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
							Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat/ tamu	100 persen			
							Persentase penyediaan rapat-rapat koordinasi/ konsultasi SKPD	100 persen			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota		
							Persentase pemenuhan mebel kantor	85 persen			
						1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
							Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85 persen			
						1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung kegiatan kantor	80 persen			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	100 persen			
						1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa listrik, air dan jasa komunikasi	100 persen			
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan kantor	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase jumlah KDO yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan	100 Porsen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Sekolah Dasar		1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang			
		APK PAUD	100 persen								
		APK SD/ MI/ sederajat	100 persen								
		APK SMP/ MTs/ sederajat	100 persen								
		APM SD/ MI/ sederajat	100 persen								
		APM SMP/ MTs/ sederajat	100 persen								
		Nilai Rata-rata Rapor siswa Kelas IX SMP	88 Nilai								
		Nilai Rata-rata Rapor siswa Kelas VI SD	85 Nilai								
						1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang			
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			
							Persentase Sekolah (SD) yang memiliki Fasilitas/ Utilitas Sekolah Sesuai SNP	100 persen			
							Persentase sekolah SD yang menerapkan pembelajaran berbasis IT	60 persen			
						1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Kebaran Kegiatan	Target Capaian		Kebaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Persentase sarana, prasarana dan utilitas SD kondisi baik	0 Unit 100 persen		
							1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Persentase ketersediaan Mebel sekolah (SD) dengan jumlah siswa	0 Paket 95 persen		
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Persentase siswa SD yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa	0 Unit 100 persen		
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa miskin (SD) yang mendapatkan jaminan pendidikan	0 Peserta Didik 100 persen		
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Persentase sekolah (SD) yang memiliki Alat Praktik dan Peraga sesuai SNP	0 Paket 80 persen		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Persentase angka kelulusan siswa jenjang SD	0 Satuan Pendidikan 100 persen		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD berprestasi dibidang iptek, olahraga dan seni Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 siswa 0 Peserta Didik		
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rasio pendidik dan tenaga kependidikan / siswa jenjang SD	0 Orang 20 persen		
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Persentase guru (SD) yang memiliki sertifikat pendidik	0 Orang 100 persen		
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Persentase Kepala SD yang memiliki NIKS	0 Satuan Pendidikan 100 persen		
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Rasio ketersediaan ruang kelas per jumlah siswa SD Rasio ketersediaan ruang kelas per jumlah siswa SMP	0 Ruang 24 persen 40 persen		
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		
							1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit		
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Persentase Sekolah (SMP) yang memiliki Fasilitas/Utilitas Sekolah Sesuai SNP Persentase sekolah SMP yang menerapkan pembelajaran berbasis IT	0 Unit 90 persen 85 persen		
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokal Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Persentase ketersediaan Mebel sekolah (SMP) dengan jumlah siswa	0 Paket 92 persen		
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Persentase siswa SMP yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa	0 Paket 100 persen		
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa miskin (SMP) yang mendapatkan jaminan pendidikan	0 Peserta Didik 100 persen		
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Persentase sekolah (SMP) yang memiliki Alat Praktik dan Peraga sesuai SNP	0 Paket 100 persen		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Persentase angka kelulusan siswa jenjang SMP	0 Peserta Didik 100 persen		
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMP berprestasi dibidang Iptek, olahraga dan seni Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6 Siswa 0 Peserta Didik		
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rasio pendidik dan tenaga kependidikan / siswa jenjang SMP	0 Orang 20 persen		
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Persentase guru (SMP) yang memiliki sertifikat pendidik	0 Orang 54 persen		
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Persentase Kepala SMP yang memiliki NIKS	0 Satuan Pendidikan 100 persen		
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Persentase ketersediaan Ruang kelas / ruang guru pada satuan PAUD	0 Unit 85 persen		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Persentase lembaga PAUD yang memiliki utilitas sekolah sesuai SNP	0 Unit 20 persen		
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Persentase ketersediaan Mebel sekolah (PAUD) dengan jumlah siswa	0 Paket 50 persen		
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket		
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa miskin (PAUD) yang mendapatkan jaminan pendidikan	0 Peserta Didik 15 persen		
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Persentase Lembaga PAUD yang memiliki Alat Praktik dan Peraga sesuai SNP	0 Paket 60 persen		
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Persentase siswa PAUD yang menamatkan pendidikan pada lembaga PAUD	0 Peserta Didik 3565 Siswa		
							1.01.02.2.03.14 Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Persentase lembaga PAUD yang berstatus negeri	0 Satuan Pendidikan 75 persen		
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Rasio ketersediaan pendidik per siswa PAUD	0 Orang 100 persen		
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Persentase pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidik PAUD	0 Orang 75 persen		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase Pimpinan Lembaga PAUD yang memiliki NIKS	0 Satuan Pendidikan 20 persen		
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit		
							1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Persentase lembaga PNF yang memiliki Fasilitas/ Utilitas Sekolah Sesuai SNP	0 Unit 100 persen		
							1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase lembaga PNF kondisi baik	0 Unit 100 persen		
							1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Persentase ketersediaan Mebel sekolah (SPNF) dengan jumlah warga belajar	0 Paket 100 persen		
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Persentase warga belajar yang menamatkan program pendidikan kesetaraan	0 Peserta Didik 42 persen		
							1.01.02.2.04.13 Penyalpan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Slap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan Persentase lembaga pendidikan kesetaraan/ nonformal terakreditasi minimal B	0 Satuan Pendidikan 100 persen		
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio ketersediaan pendidik Tutor/ pamong belajar per warga belajar PNF	0 Orang 69 persen		
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Persentase pendidik Tutor/ pamong belajar pendidikan kesetaraan yang memenuhi kualifikasi pendidik kesetaraan / PNF	0 Orang 100 persen		
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan	100 persen	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya Persentase pendidik yang menguasai kurikulum muatan lokal	0 Orang 65 persen		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan	100 persen	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen 0 Laporan		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	0 Orang/bulan 14 Bulan 12 Bulan		
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisnya Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisnya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 15 Orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	0 Paket 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	0 Paket 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Persentase Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 100 Persen 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO Yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang Diadakan Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang Diadakan	0 Unit 10 Unit 40 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 40 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen		
							1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 100 Persen		
							1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Didadakan	0 Laporan 10 Unit/Jenis		
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase Pemeliharaan dan Perawatan KDO	0 Unit 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	0 Unit 3 Unit/Jenis 10 Unit/Jenis		Kab. Bolaang Mongondow Utara
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung/Kantor yang Terpelihara	0 Unit 16 Unit		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	95 persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan RS yg dibangun Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit 0 Unit		
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Persentase Bangunan Puskesmas Yang Sesuai Standar	0 Unit 100 Persen		
							1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan RS yg dilakukan pengembangan Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setlap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit 0 Unit		
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1 Unit 0 Unit		
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung IFK dan Pustu yang di rehab Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit 0 Unit		
							1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit		
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas, IFK dan PSC Yang Memiliki Sarana Sesuai Standar Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 unit 0 Unit		
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Ambulance dan Mobil Operasional Lainnya yg diadakan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Pendukung yang dibangun Persentase Alat Kesehatan Sesuai Standar	2 Unit 0 Unit 6 Unit 95 persen		
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Persentase Pengadaan Obat dan BMHP Puskesmas. Persentase Pengadaan Obat dan BMHP Puskesmas dan RS Pratama Persentase Pengadaan Obat dan BMHP Rumah Sakit	0 Paket 97 Persen 97 persen dan RS Pratama 97 Persen		
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Persentase Pemenuhan bahan makanan RS Persentase Pemenuhan bahan makanan RS Pratama	0 Paket 100 persen 100 Persen		
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Persentase Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	0 Unit 1 Unit		
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas yang Dipelihara (Kalibrasi) Jumlah Alat Kesehatan RSUD yang Dipelihara (Kalibrasi)	0 Unit 10 Unit 10 Unit		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pertemuan advokasi Resiko Tinggi Kehamilan Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas dan Jaringannya	0 Orang 30 orang 95 Persen		
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil yang Memiliki Jaminan Persalinan Persentase Pelayanan Kesehatan Kunjungan Nifas (KNFI)	0 Orang 100 Persen 97 Persen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Terpadu Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Nakes yg mengikuti pertemuan pengurusan advokasi yankes terpadu Persentase Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	1555 orang 0 Orang 30 orang 0,46 Persen		
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Datang di Tempat Pelayanan Kesehatan/Posyandu (D/S) Jumlah Balita yang dilakukan Penanganan MTBS (Managemen Terpadu Balita Sakit) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penjarangan Siswa	97 Persen 200 orang 0 Orang 100 Persen		
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase remaja putri yg mendapatkan Tablet Tambah darah	0 Orang 89 Persen		
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Nakes yg mengikuti Pelatihan Lansia dan geriatr. Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Posyandu Lansia Aktif	30 Orang 0 Orang 112 Pos		
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana dan Daerah DTPK Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	18 Desa 0 Dokumen		
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Kegiatan Advokasi dan Intervensi Stunting yg dilaksanakan. Persentase ASI Eksklusif Persentase Balita Gizi Buruk,Gizi Kurang Yang Mendapatkan Perawatan Persentase Balita Yang Naik Timbangan Berat Badan (N/D)	0 Dokumen 6 Kegiatan 65 Persen 100 Persen 95 Persen		
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah pelayanan Pos UKK	0 Dokumen 5 Pos		
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan, Pasar,Pemeriksaan Sampel Air Minum Dan Makanan. sa Yang Dilaksanakan Petemuan PAM STBM dan Deklarasi STOP BABS	1 Dokumen 0 Dokumen 4 Kali 75 Persen		
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Kelompok Pengembangan TOGA Di Masyarakat	0 Dokumen 6 Kelompok		
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase Data Dasar yang Tersedia Dalam Pengambilan Kebijakan Pencegahan Penyakit Persentase Pemeriksaan pengambilan Sampel Penyakit	0 Dokumen 100 Persen 100 Persen		
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Operasi katarak Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Sunatan Massal Persentase Calon Jemaah haji Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)	0 Dokumen 40 Orang 180 orang 100 Persen		
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Kegiatan Advokasi, Pelatihan dan Intervensi Deteksi Dini Penanganan Kasus Peny.Menular dan Tdk Menular Persentase Alat dan Bahan Penunjang, Diagnostik Set Program Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Pelugas Yang Di Latih Program Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak menular	0 Dokumen 23 Keg 100 Persen 100 Persen 100 Persen		
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Kepesertaan PBI dari Pembiayaan APBD Kabupaten	0 Dokumen 22300 Peserta		
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tingkatan Kabupaten Sehat	0 Dokumen 1 Kelas		
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Operasional Pelayanan RS	0 Dokumen 100 Persen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokal Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keuaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen		
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit		
							1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Butan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0 Dokumen		
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen		
				1.02.02.2.04 Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah RSUD Yang akan di Tingkatkan Kelas	1 Unit		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas 96 persen Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang		
								Jumlah Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah di Puskesmas dan Jaringannya	200 Orang		
								Jumlah Tenaga Kesehatan Kontrak daerah DI Rumah Sakit	150 Orang		
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen		
								Jumlah Nakes yang Memiliki STR	270 Orang		
								Jumlah Tenaga Kesehatan yg bersertifikat BTCLS/ATLS (Penanganan Kegawatdaruratan)	160 Orang		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang memiliki Izin Usaha sesuai standar	55 persen	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang dilaksanakan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	225 Unit		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Xel yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100 persen	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen		
								Jumlah Jenis Media Untuk Kegiatan Kampanye GERMAS	3 Jenis		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen		
								Jumlah Peserta Kampanye Kesehatan	620 Peserta		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen		
								Jumlah Kegiatan Orientasi SBH dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5 Keg		
								Jumlah Penyandu Aktif	112 Pos		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Sekretariat Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
								Persentase Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen		
							1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		
								Jumlah PNS yang Menerima Honorarium Pelaksanaan Tugas	10 Orang		
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		Kab. Bolaang Mongondow Utara
								Jumlah Pasang Pakaian Dinas Yang diadakan	100 Pasang		
							1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		Semua Kab/Kota
								Jumlah PNS Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	50 Orang		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Komponen		Kab. Bolaang Mongondow Utara

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Alat Tulis Kantor, Materi dan Bahan/Alat Pembersih Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Paket yang Disediakan	40 Komponen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Komponen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Komponen 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Komponen Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Akomodasi disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Komponen 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, SKPD	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Rapat PD yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	2 Komponen 0 Laporan 12 Bulan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit		
							1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Mebebur yang diadatkan	0 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Diadatkan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan		
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Waktu Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor (THL Administrasi, THL Operator, Keamanan, Cleaning Service)	0 Laporan 12 Bulan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan yang tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit 27 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinan Jumlah Unit Alat Besar yang tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	0 Unit 1 Unit		
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Terpelihara	50 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Terpelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 0 Unit		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber air / Sungai ber kondisi baik dan kondisi debit air stabil Jaringan Irigasi Baik	55 Persen	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun, Jumlah Laporan Pendataan SDA Tersusun	1 Dokumen		1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun, Jumlah Laporan Pendataan SDA Tersusun Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							1.03.02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Bangunan Air Baku dibangun Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	2 Unit 0 KM		
							1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai dibangun Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1500 Meter 0 KM		
							1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai dibangun Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	500 Meter 0 KM		
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	650 Meter 0 KM		
							1.03.02.2.01.48 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Unit Bendungan Terpelihara	0 Unit 7 Unit		
							1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara Panjang Tanggul Sungai Terpelihara	0 KM 500 Meter		
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Tersusun, Jumlah Dokumen Lingkungan Untuk Irigasi Tersusun	1 Dokumen		1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Tersusun, Jumlah Dokumen Lingkungan Untuk Irigasi Tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3000 Meter 0 KM		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan irigasi Optimal dan Terpelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25000 Meter 0 KM		
							1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi Persentase Pemenuhan Operasional Komisi Irigasi dan Teraga Perjaga Pintu Air	0 Unit 100 Persen		
							1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Jumlah Laporan Monitoring, Inspeksi dan Pengawasan Irigasi Tersusun/Pengawasan Pekerjaan Terlaksana	0 Di 6 Laporan		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak	92 Persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan SPAM/Pengawasan Pekerjaan Terlaksana	0 Dokumen 5 Laporan		
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR Tersedia Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan yang dibangun	250 SR 0 Liter/Debit 3000 Meter		
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah SR Tersedia Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan yang dibangun	0 SR 250 SR 3000 Meter		
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR Tersedia Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan yang ditingkatkan Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	250 SR 3000 Meter		
							1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR Tersedia Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan yang ditingkatkan	0 250 SR 3000 Meter		
							1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi Jumlah Laporan Pengawasan Persentase Layanan operasional PAMSIMAS	0 Kelompok Masyarakat 5 Laporan 100 Persen		
							1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Persentase Layanan operasional UPTD SPAM	0 Penyelenggara SPAM 100 Persen		
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Layanan Air Minum Rumah Tangga Optimal Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan berkeondisi baik	0 Unit 15000 SR 500 Meter		
							1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR Tersedia Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan yang diadakan perluasan	0 250 SR 3000 Meter		
							1.03.03.2.01.21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR Tersedia Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan yang diadakan perbaikan	500 SR 0 Unit 10000 Meter		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan berkeondisi baik	25 Persen	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Tersusun	1 Dokumen 0 Dokumen	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Persampahan Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Tersusun	0 Dokumen 1 Laporan		
							1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terpelihara	0 Rumah Tangga 1 Unit		
							1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terpelihara	0 Unit 1 Unit		
							1.03.04.2.01.05 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang disediakan Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit 0 Unit		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Limbah Aman	30 Persen	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Pengembangan Air Limbah Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ker.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Air Limbah/Pengawasan Pekerjaan Terlaksana	0 Dokumen 1 Laporan		
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit IPAL/SR terpelihara Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	10 Unit 0 Unit		
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah SR Tersedia Jumlah Unit IPAL dibangun	0 Rumah Tangga 500 SR 50 Unit		
							1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Unit Bangunan/Sarpras IPLT Tersedia Kapasitas IPLT Terbangun	2 Unit 0 M ³ /hari		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Pengurangan Luasan Genangan Banjir	30 Persen	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Teknis Drainase Tersusun	1 Dokumen	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Teknis Drainase Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Drainase Tersusun/Pengawasan Pekerjaan Terlaksana	0 Dokumen 1 Laporan		
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sakuran Drainase Perkotaan yang Dibangun Panjang Sakuran Drainase Terbangun	0 M 1500 Meter		
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Sakuran Drainase Terpelihara Panjang Sakuran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	3000 Meter 0 M		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Pemenuhan Trotoar dan Jalan Permukiman	25 Persen	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang Trotoar dan Jalan Permukiman dibangun	0 Sistem Jaringan 700 Meter		
							1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang Trotoar dan Jalan Permukiman Terpelihara	0 Sistem Jaringan 500 Meter		
							1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Tersusun/Pengawasan Pekerjaan terlaksana Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan 0 Sistem Jaringan		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Bangunan Gedung yang laik fungsi	9 Persen	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Rekomendasi Teknis IMB, SLF Bangunan Gedung Yang dikeluarkan	0 Dokumen 50 Dokumen	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG Jumlah Rekomendasi Teknis IMB, SLF Bangunan Gedung Yang dikeluarkan	0 Dokumen 50 Dokumen		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Bangunan Kawasan Lingkungan Berkondisi Baik	78 Persen	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Tersusun	0 Dokumen 1 Dokumen		
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Unit Bangunan Lingkungan Tertata/Dibangun	0 Kawasan 2 Unit		
							1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Unit Bangunan Lingkungan Terpelihara dengan Baik	0 Kawasan 1 Unit		
							1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Laporan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Tersusun/Pengawasan terlaksana	0 Dokumen 1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian							
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	85 Persen	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0 Dokumen	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Terusun	1 Dokumen								
						1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan/Sistem Informasi Jalan Terusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0 Dokumen								
						1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Kondisi Jalan/Jembatan Terusun	2 Dokumen								
						1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	7000 Meter	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM								
						1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0 KM	Panjang Jalan yang direkonstruksi/ditingkatkan	15000 Meter								
						1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 KM	Panjang Jalan yang terpelihara secara Berkala/direhabilitasi	5000 Meter								
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 KM	Panjang Jalan yang terpelihara secara rutin	50000 Meter								
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah Unit Jembatan Dibangun	3 Unit	Panjang Jembatan Dibangun	8 Meter	Panjang Jembatan yang Dibangun	0 M						
						1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Unit/Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	2 Unit	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	0 M								
						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0 Dokumen	Jumlah Laporan Pengawasan Terusun/Pengawasan Pekerjaan Terlaksana	10 Laporan								
						1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	15 Persen	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	0 Orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	25 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	Volume Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Kali
												1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Tersertifikasi	0 Orang	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	70 Orang		
1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Laporan														
1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100 Persen														
1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0 Dokumen	Jumlah Laporan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Tersedia	1 Laporan														
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	0 Dokumen	Jumlah Laporan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Terusun	1 Laporan														
1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti Pembinaan dan peningkatan Kapasitas	20 Badan usaha	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	0 Orang														
1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Bimtek	20 Orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Orang	Volume Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang diikuti/dilaksanakan							1 Kali						
1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan, dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Terusun	1 Laporan														
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82 Persen	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen							1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Terusun	1 Dokumen		
						1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	Peserta yang Mengikuti sosialisasi	20 Orang	Volume Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	1 Kali						

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	0 Dokumen 5 Laporan 12 Bulan		
							1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Aduan Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah Kegiatan Sosialisasi (Perencanaan, Pemanfaatan, Pengedalin Tata Ruang)	10 Aduan 0 Dokumen 1 Kegiatan		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0 Dokumen	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Dokumen, Data dan Sistem Informasi Penataan Ruang Tersedia	0 Dokumen 1 Dokumen		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Ruang Jumlah Waktu Pengawasan Tata Ruang	0 Dokumen 30 Dokumen 12 Bulan		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen		
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Komponen Listrik Yang Tersedia	0 Paket 16 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 19 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Presentase Pemenuhan Pelayanan	0 Paket 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pengembangan Kapasitas Melalui Rapat - Rapat Koordinasi	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit 0 Unit	Semua Kab/Kota	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	0 Laporan 5 Unit		
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Orang/bulan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Glaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	0 Unit 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak 70.13 Persen Huni		1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	0 Unit/Rumah	1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah		
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Laporan	1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Laporan		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Kumuh Tertangani 51.50 Persen		1.04.03.2.01 Pemberian Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	0 Dokumen	1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	0 Dokumen		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Layanan Akses Sanitasi Ungkungan Perumahan	345 Persen	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan Gaji/Tunjangan	0 Orang/bulan 100 % 100 Persen		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang 0 Orang		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah/Jenis Barang cetak/Penggandaan yang diadakan Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan	105 Dokumen 100 Persen 415 Kali	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	0 Paket 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit/jenis 0 Paket 35 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang cetak/Penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase penyediaan administrasi perkantoran	105 Dokumen/Jumlah 0 Paket 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Persentase penyediaan administrasi perkantoran	0 Laporan 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan Persentase penyediaan administrasi perkantoran	0 Laporan 415 Kali 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas operasional	0 Unit 1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit 0 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen 100 Persen	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa perkantoran	0 Laporan 100 % 100 Persen		
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase penyediaan jasa perkantoran	0 Laporan 100 Persen		
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa umum kantor	0 Laporan 100 % 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang Terpelihara	100 Persen	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Persentase jasa pemeliharaan BMD dan pajak kendaraan Persentase Kendaraan Dinas yang Terpelihara	0 Unit 100 Persen 100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya Persentase Kendaraan Dinas yang Terpelihara	0 Unit 100 %		
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	0 Unit 8 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya gedung kantor	0 Unit 1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakkan Perkada	100 persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Satpol PP	92 Orang	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Anggota Satpol PP	92 Orang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Kasus		
				Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	20 Orang		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	6 kali				
						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	20 Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		
							Persentase Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan	0 %				
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan Sah/Legal	5 Desa	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen bencana yang syah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen		
						1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0 Orang	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100 Persen		
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga negara yang ikut pelatihan	2 Dok	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Orang	Persentase SDM yang menangani korban bencana	100 Persen		
				Jumlah Warga negara yang mendapat peralatan dan perlindungan	80 Persen					Persentase SDM yang menangani korban bencana	12 kg/Kapita	
				Presentase penanganan kesiapsiagaan bencana	80 Persen				Tersedianya Layanan PUSDALOPS	100 Persen		
				Tersedianya Layanan PUSDALOPS Penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	100 Persen							
						1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Persentase penanganan kesiapsiagaan bencana	100 Persen		
						1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0 Unit	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan dan perlindungan	100 Orang		
						1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan	Tersedianya layanan pUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	7 Kegiatan		
						1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0		4 Dokumen		
						1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparat dan warga negara yang ikut pelatihan	30 Peserta	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang		
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 Persen	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	5 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang		
				Jumlah Logistik dan operasional, koordinasi dan distribusi logistik	100 Persen							
						1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	Jumlah logistik dan operasional, koordinasi dan distribusi logistik	1 Unit		
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani	2 Kali	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran	1 Dokumen	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan		
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1 Kegiatan	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1 Kali	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan	100 %		
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	23 Pasang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan	3 Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan				Ker.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket	100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan belanja cetak dan penggandaan 5 d/j		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan 2 Unit	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 1 u/j	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit	1 Unit		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan	100 Persen		
							1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 100 Persen			
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara 10 Unit	0 Unit		
							1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kessos	100 persen	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orsos/Ormas yang aktif	7 SDKS	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya 0 Keluarga	7 SDKS		
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Lembaga	1 Orsos/Ormas		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial	44 persen	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (Natura)	150 Orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Pemakanan	Jumlah Lanjut Usia yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (Natura) 150 Orang	0 Orang		
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu 12 Orang	0 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak putus sekolah yang memiliki keterampilan 6 Orang	0 Orang		
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang	2 Puskesmas		
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Pemakanan	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang terbantu dalam menjalankan fungsi sosialnya 5 Orang	0 Orang		

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Jumlah Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 1 Orang 0 Orang		
							1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah pelaku Usaha dan Kemitraan yang melakukan tanggungjawab peningkatan kesejahteraan sosial (CSR)	0 Dokumen 1 U/K		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase FMKS yang menerima Bansos Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data program bansos yang tervalidasi	1 Data	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data program bansos yang tervalidasi Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1 Data 0 Orang		
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Sarpras pengelolaan data yang terpenuhi	0 Keluarga 2 Unit		
							1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapat bansos Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah RS RTLH Yang terlayani Persentase KPM penerima Program Bansos yang terdampangi	100 KK 0 Keluarga 10 KK 100 Persen		
							1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang menerima Bansos Sarpras pendukung usaha Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Kelompok 0 Orang		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yg Menerima Bansos Dalam Masa Tanggap Darurat	100 persen	1.06.06.2.01 Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bufferstok yang tersedia	2 Paket	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Bufferstok yang tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Paket 0 Orang		
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana dan / atau Relawan Sosial yang tersedia	44 Orang	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Taruna Siaga Bencana dan / atau Relawan Sosial yang tersedia	0 Orang 44 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 Persen		
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti/Dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Kali 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah / Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	734 unit / 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah / Jenis Barang Cetak/Penggandaan Yang Diadakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5934 d/1 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi /Konsultasi Yang Dilaksanakan	0 Laporan 22 Kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler Yang Diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit 0 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah / Jenis Peralatan Mesin Lainnya Yang Diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit / 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100 Persen		
							2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 100 Persen		
							2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya persentase kendaraan dinas yang terpelihara	0 Unit 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Kebiasaan Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	0 Unit 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 0 Unit		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100 persen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen 0 dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen 0 Dokumen		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Tertarief Yang Mendapatkan Pelatihan	100 persen	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Lulus Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	71 orang 0 orang	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Lulus Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	71 Orang 0 Orang		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Tertangani	98 persen	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Pejalan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tertarief sebagai Peserta Jamstok serta Pengupahan Jumlah Pekerja Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0 laporan 3177 orang	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tertarief sebagai Peserta Jamstok serta Pengupahan Jumlah Pekerja Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0 Laporan 3177 Orang		
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan Yang Mematuhi Aturan Perundang-Undangan	0 perkara 26 perusahaan	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan Yang Mematuhi Aturan Perundang-Undangan	0 Perkara 26 Perusahaan		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD	55 Persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG	250 Orang	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRPG) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang 0 Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	100 persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	0 Dokumen 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kasus kekerasan yang terselesaikan	0	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	25 kasus	2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Kasus 0 Perangkat Daerah		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas layanan PUSPAGA	15 kali	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas layanan PUSPAGA Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Kali 0 Layanan		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	70 Persen	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Jumlah Peserta terlatih mengenai pemenuhan hak anak	50 Orang	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Jumlah Peserta terlatih mengenai pemenuhan hak anak	0 Organisasi 50 Orang		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan forum anak	10 kali	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pendampingan forum anak	0 Dokumen 10 Kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitator Layanan Anak Yang Terlatih	0 Dokumen 35 Orang		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 Persen		
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Kali 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Unit 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	0 Laporan 12 Kali		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit 0 Unit		Semua Kab/Kota	
							2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	0 Laporan 100 Persen			
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhnya jasa pelayanan umum kantor	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.09.01.2.09.01 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	0 Unit 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	0 Unit 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung yang direhabilitasi/dipelihara	0 Unit 1 Unit			
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAH PANGAN	Indeks Ketersediaan	98,50 poin	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 kelompok 2 unit		2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 Kelompok 0 Unit			
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Pemanfaatan	70,85 poin	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok tani yang difasilitasi bantuan benih Hortikultura Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 kelompok 0 laporan		2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok tani yang difasilitasi bantuan benih Hortikultura Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 Kelompok 0 Laporan			
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	0 ton 5 ton		2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	0 Ton 5 Ton			
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Tersusunnya Laporan Analisis Pola Konsumsi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0 dokumen 1 laporan		2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Tersusunnya Laporan Analisis Pola Konsumsi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0 Dokumen 1 Laporan			
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Industri Pangan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Kelompok 0 Laporan			
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Indeks Keterjangkauan	90,00 poin	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bantuan Bahan Makanan	0 dokumen 6 desa		2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bantuan Bahan Makanan	0 Dokumen 6 Desa			
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Yang Aman dikonsumsi	100 persen	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yg memahami tentang pangan yg bermutu dan aman Kelembagaan/Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	30 orang 0 dokumen		2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yg memahami tentang pangan yg bermutu dan aman Kelembagaan/Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	30 orang 0 Dokumen			
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	0,21 Persen	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan		2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			
							2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen			
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket		Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Kec. Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	0 Paket		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		Semua Kab/Kota	
						2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			
						2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	0 Unit			
						2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
						2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang tersusun	2 Dokumen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	1 Dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Tersusun	1 Dok			
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas Air dalam kategori baik	0 Baik	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Panjang Drainase dan batu jalan Bukota kabupaten yang terpelihara	11000 Meter	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen			
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data pemantauan kualitas air dan udara	46 Titik Sampel	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan			
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Panjang Drainase dan batu jalan Bukota kabupaten yang terpelihara	11000 Meter	2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	0 Dokumen			
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Kawasan Tutupan Lahan	66500 Ha	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Mangrove yang ditanam	6 Lokasi	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha			
						2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha			
						2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	0 Unit			
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100 Persen	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Kegiatan Peduli Lingkungan	59 Persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	80 Persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Ditolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Tenaga kebersihan	0 Kelompok 0 Ton 111 Orang	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Ditolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota TENAGA KEBERSIHAN	0 Ton 111 Org		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok		
							2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen		
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedia penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 persen		
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang Diadakan	20 pasang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan/workshop/pelatihan dan sejenisnya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 unit/jenis 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.12.01.2.06.03 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah/jenis barang cetak/pengandaan yang diadakan	100 dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	0 Laporan 100 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang diadakan	1 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	3 unit	Semua Kab/Kota	
							2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 persen		
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 persen		
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yan	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100 persen	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	1 Aplikasi	2.12.04.2.03.03 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi Berbasis Daring Yang Diumbahkan Jumlah dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	2 aplikasi 11 dokumen		
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan			
							2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kelengkapan Kader PKK dalam Kegiatan Jambore PKK, BBGRM dan HGG-PKK	0 Dokumen 107 Desa / Kel			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi kepegawalan	100 Persen	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 Persen			
		Persentase kelengkapan administrasi kepegawalan	94 Persen									
		Persentase kelengkapan administrasi keuangan	94 Persen									
		Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan	100 Persen									
		Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD	94 Persen									
		Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD	100 Persen									
		Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen									
				2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisnya	5 Orang		Semua Kab/Kota	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen Instalasi Listrik	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Paket 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Persentase penyediaan belanja cetak dan penggunaan	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi SKPD dan makanan dan minuman rapat dan tamu	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen			
							2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100 Persen			
							2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	0 Unit 6 Unit			
							2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	5 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0 Unit 1 Unit			
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan dokumen kependudukan	100 Persen	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Grand Desain Kependudukan	3 dokumen	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Desain Kependudukan Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen 0 Dokumen			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan keluarga Persentase penyusunan dokumen profil kependudukan	467 orang 100 persen	2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan Persentase penyusunan dokumen profil kependudukan	0 Laporan 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	467 Orang 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	80 Persen	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta Sosialisasi kependudukan dan KB Jumlah peserta yang memahami desiminasi strategi advokasi KIE	40 orang 40 peserta	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Peserta Sosialisasi kependudukan dan KB	0 Dokumen 40 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah peserta yang memahami desiminasi strategi advokasi KIE	0 Dokumen 40 Peserta	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Peserta yang Terlatih dalam Pengembangan Pengelola dan Pelaksanaan Advokasi, KIE dan Pencitraan (PLKB/PKB, Kader, Bidan)	467 orang	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Peserta yang Terlatih dalam Pengembangan Pengelola dan Pelaksanaan Advokasi, KIE dan Pencitraan (PLKB/PKB, Kader, Bidan)	0 Laporan		
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akseptor yang dilayani Jumlah kader KB yang dibina Jumlah petugas medis (dokter, bidan dan perawat) yang mengikuti pertemuan	300 aseptor 467 orang 30 orang	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Akseptor yang dilayani Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	300 Akseptor 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kader KB yang dibina Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	467 Orang 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah petugas medis (dokter, bidan dan perawat) yang mengikuti pertemuan Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang 0 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang peduli KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	20 orang 0 organisasi	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang peduli KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	20 Orang 0 Organisasi	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	2.14.04 PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader poktan dan bina keluarga	70 Persen	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah Jumlah Kelompok BKB Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengikuti Pelatihan	45 forum 107 kelompok 75 orang	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	107 Kelompok 0 Kelompok	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang 75 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45 Forum 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 0 Orang/bulan		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pasang Pakaian Yang Didadakan	0 Paket 44 Pasang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang memahami Tata Tertib Berlalu Lintas	0 Orang 100 Orang		
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perengkapan/Peralatan Kantor Yang Diadakan	3 Jenis	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota	
								2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
								2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
								2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		
								2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	0 Unit		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Meningkatnya Peringkat Sarana dan Prasarana Jalan	45,99 Persen	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit			
			2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit 0 Orang	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit			
								2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		
			2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit			
			2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Laporan 0 Orang	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalin	Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang			
								2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi	0 Laporan		
			2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan ULAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Pengemudi yang mendapatkan pembinaan pentingnya keselamatan dalam berkendara	0 Laporan 0 Laporan 250 Unit	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Semua Kab/Kota		
								2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Pengemudi yang mendapatkan pembinaan pentingnya keselamatan dalam berkendara	0 Laporan 250 Unit		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi keuangan	100 Persen	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terpenuhinya Laporan keuangan SKPD	0 Laporan	1 Laporan	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang hasil cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Jenis	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara
							2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan		Kab. Bolaang Mongondow Utara
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi diluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	0 Unit	Semua Kab/Kota
							2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase ketersediaan bahan material dan benda pos lainnya	0 Laporan	100 Persen	
							2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %		
							2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Laporan	100 Persen	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 Persen		
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya	12 Bulan		Kab. Bolaang Mongondow Utara
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	2 Unit		
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi yang diupdate pada website penda	500 Kali	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 laporan		2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Laporan Pengawasan Opini dan Aspirasi Publik	0 Dokumen	6 laporan	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Pembuatan Video Pembangunan daerah	0 Dokumen	2 Video	
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah deseminasi informasi yang di publish Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	50 kali	0 Dokumen	
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0 Orang	
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah media massa yang bekerja sama	0 Dokumen	9 media	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	100 Persen	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi sistem informasi penunjang SPBE yang aman	1 aplikasi	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi sistem informasi penunjang SPBE yang aman	0 Unit	1 Aplikasi	
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan kompetensi TIK	0 Dokumen	3 Orang	
							2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	0 Dokumen	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang meningkat kwalisasinya berdasarkan RAT dan Volume Usahanya	27 persen 26 persen	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan akuntansi dan manajemen koperasi	30 orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	28 persen	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan	0 Unit Usaha 30 Orang			
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	35 Unit Usaha	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100 %	2.18.01.2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 %			
					2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan pelaksanaan tugas ASN	100 %			
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 % 0 Orang	Semua Kab/Kota		
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah/jenis barang komponen listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 u/j 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 u/j 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 d/j 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	0 Laporan 0 ka\$	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/ur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit 0 Unit	Semua Kab/Kota		
					2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 buah 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 100 %			
					2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	0 Laporan 100 %			
					2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	0 Unit 100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	0 Unit 100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
					2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung yang direhabilitasi/dipelihara	0 Unit 1 unit			
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN DLM PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investasi	20 lembaga	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Perda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen 1 dokumen			

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investor yang difasilitasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	50 lembaga 0 Kegiatan Usaha		
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Unggulan daerah	0 Dokumen 1 dokumen			
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Unggulan daerah	0 Dokumen 1 dokumen		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase potensi unggulan yang dipromosikan	100 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan	0 Dokumen 2 kali		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik	150 dokumen 0 Pelaku Usaha		
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Presentase pemenuhan komitmen perizinan yang keluar	0 Kegiatan Usaha 100 %		
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kasus penerbitan izin yang tertangani Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 lokasi 0 Orang		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Usaha, Pelaksanaan Penanaman Modal Presentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	0 Kegiatan Usaha 100 %		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Presentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	0 Pelaku Usaha 100 %		
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal Presentase pelaku usaha yang diawasi	0 Kegiatan Usaha 100 %		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan yang memanfaatkan aplikasi	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Aplikasi Perizinan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Dimanfaatkan	1 Aplikasi 0 Dokumen		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEREMUDAAN DAN OLAH RAGA											
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian Persentase kelengkapan Administrasi Keuangan Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD	100 persen 100 Persen 100 persen	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Presentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 Persen		
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Pasang 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti/dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Presentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 unit/jenis 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Unit/jenis 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat/koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	0 Laporan 52 Kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pecunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit 0 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Pecunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 Persen		
							2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Presentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0 Laporan 100 Persen		
							2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pecunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Presentase kendaraan dinas yang terpelihara	0 Unit 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Presentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	0 Unit 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung yang direhabilitasi/dipelihara	0 Unit 1 Unit		
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	100 persen	2.19.02.2.01 Penyediaan, Pembedayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ikut Jambore pemuda	20 OKP	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ikut jambore pemuda Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dilibatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 OKP 0 Orang			
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dilibatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah wira usaha yang dilatih	0 Orang 20 Orang		
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah regu pasukan pengibar bendera merah putih	0 Orang 1 Regu		
				2.19.02.2.02 Pembedayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelajar yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pelajar yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	30 Orang 0 Orang		
							2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina	20 OKP	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Kejuaraan yang Diraih	100 persen	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelajar yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pelajar yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	30 Orang 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah sarana prasarana olahraga yang tersedia	0 Unit 3 Unit		
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang ikut Kejuaraan dan Pekan Olahraga	150 Orang	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang ikut Kejuaraan dan Pekan Olahraga Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang 0 Dokumen		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data keolahragaan yang dihasilkan	3 Data	2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah data keolahragaan yang dihasilkan	0 Dokumen 3 Data		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Festival dan Olahraga Rekreasi	155 Orang	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Festival dan Olahraga Rekreasi	155 Orang		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang akurat dan terukur	100 Persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sektoral pemuda yang dimutakhirkan Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1000 data 0 dokumen	2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral pemuda yang dimutakhirkan Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1000 data 0 Dokumen			
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis kebudayaan yang dikelola	60 persen	2.22.02.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.22.02.01.01 Peleindngan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah even pagelaran kebudayaan yang dilaksanakan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Peleindngan, Pengembangan, Pemanfaatan Presentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	10 event 0 Objek 100 persen			
						2.22.02.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang			
				2.22.02.02 Pelestarian Kasenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.22.02.02.01 Peleindngan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah museum daerah yang dilindungi Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Peleindngan, Pengembangan dan Pemanfaatan Persentase tradisi kebudayaan yang dikembangkan	0 museum 0 Objek 100 persen			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah data sejarah daerah yang ditata	1 Dokumen	2.22.04.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.22.04.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data sejarah yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen masyarakat 0 Dokumen			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yg dikelola	1 cagar	2.22.05.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		2.22.05.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Cagar 0 Objek			
						2.22.05.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Cagar 0 Objek			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	100 persen	2.23.02.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Perpustakaan Desa Persentase bahan pustaka yang dimutakhirkan	1 unit 250 exemplar	2.23.02.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Perpustakaan Desa Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Unit 0 Perpustakaan		
							2.23.02.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Persentase bahan pustaka yang dimutakhirkan	0 Eksemplar 250 exemplar		
				2.23.02.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.23.02.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan Jumlah Lotus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 Persen 0 Lotus			
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Tunjangan Tambahan Penhasian ASN	1 Tahun 1 Tahun	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 1 Tahun		
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Rapatrapat Koordinasi/Konsultasi	0 Laporan 1 Tahun	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Material yang tersedia	1 Tahun		
							2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 1 Tahun		
							2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya Gaji/Honor THL	0 Laporan 1 Tahun	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	0 Unit 1 Tahun		
							2.24.01.2.09.05 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan Mesin yang terpelihara	0 Unit 1 Tahun	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.01 Pendiapan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah depo arsip Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Unit 0 Berkas		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelola arsip yang bersertifikasi	0 Laporan 100 Persen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dibubarkan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar			
								Persentase Arsip OPD yang ditata sesuai Standard	10 OPD			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			
								Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen			
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10 Orang	3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas yang diadakan	100 Persen			Kab. Bolaang Mongondow Utara
					Jumlah Paket Pokalon Dinas	0 Paket		Jumlah Paket Pokalon Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			
							3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10 orang			Semua Kab/Kota
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen	3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Bolaang Mongondow Utara
					Persentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	100 Persen		Persentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	100 Persen			
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Bolaang Mongondow Utara
								Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen			
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Bolaang Mongondow Utara
								Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen			
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit			Kab. Bolaang Mongondow Utara
					Jumlah peralatan yang diadakan	3 Unit		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit						
							3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit			Semua Kab/Kota
							3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	3 Unit			Kab. Bolaang Mongondow Utara
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Surat menyurat	100 Persen	3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			
					Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen		Pemenuhan Jasa Surat menyurat	100 Persen			
							3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen			
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit			Kab. Bolaang Mongondow Utara
					Jumlah peralatan yang terpelihara	5 Unit		persentase jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	100 Persen			
					Persentase pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	100 Persen						
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara	5 Unit			Kab. Bolaang Mongondow Utara
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	100 Persen			
							3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	5.800 ton	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas nelayan Tangkap	50 Unit	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang			
					Jumlah nelayan yang mengikuti Pelatihan/ Sosialisasi	80 Orang		Jumlah nelayan yang mengikuti Pelatihan/ Sosialisasi	60 orang			
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Fasilitas nelayan Tangkap	50 Unit			Kab. Bolaang Mongondow Utara
								Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200 ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bibit Ikan	50 Ekor	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bibit Ikan	50 ekor			
					Jumlah fasilitas pembudidaya ikan	50 Unit		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok			
							3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah fasilitas pembudidaya ikan	50 Unit			
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan hasil perikanan	60,00 persen	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah fasilitas pembudidaya ikan	70 Orang	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta/ pelaku Usaha yang mengikuti dipta menu serta Ikan	70 orang			
								Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha			
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokal Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi kepegawalan	94 Persen	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN "Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN"	0 Orang/bulan 100 Persen				
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan" Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Pasang 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara			
						3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan" Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 KaB 0 Orang	Semua Kab/Kota			
						3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah/jenis barang komponen listrik yang diadakan"	2 U/I	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan"	56 U/I	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								3.26.01.2.06.03 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan" Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10400 D/I 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD "Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan"	0 Laporan 50 KaB	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen		
								3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 100 Persen		
								3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya "Persentase kendaraan dinas yang terpelihara"	0 Unit 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
								3.26.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah/jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 U/I 0 Unit		
					3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Mesin Lainnya yang terpelihara	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara				
					3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung yang direhabilitasi/dipelihara	0 Unit 1 Unit					
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai	2 unit	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase hasil monev yang diindaklanjuti	0 Dokumen 9 Persen	3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase hasil monev yang diindaklanjuti	0 Dokumen 9 Persen			
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	0 Kawasan 2 Unit	3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	0 Kawasan 2 Unit			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Tersedianya Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata yang Layak huni	0 unit 2 unit	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Tersedianya Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata yang Layak huni	0 Unit 2 Unit			
				3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event wisata	2 event	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah event skala nasional yang diikuti Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya promosi pariwisata daerah melalui media cetak dan media lainnya Jumlah event skala nasional	0 dokumen 2 event 2 laporan 2 KaB	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya promosi pariwisata daerah melalui media cetak dan media lainnya	0 Dokumen 2 KaB
							3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event skala nasional yang diikuti Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Event 0 Laporan			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokal Sub Kegiatan	Ket.							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja									
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian						
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi kepegawalan Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya tunjangan penghasilan ASN	0 Orang/bulan 14 Bulan 12 Bulan										
											3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakalan yang diadakan Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Pasang 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
												3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang 0 Orang	Semua Kab/Kota		
												3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
													3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
													3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
													3.27.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Rapat Koordinasi/konsultasi dan makan minum rapat	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
														3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Penyediaan Rapat Koordinasi/konsultasi dan makan minum rapat	0 Laporan 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara
													3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang Di Adakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit/Unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara
														3.27.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/gedung Yang Dibangun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara
													3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Persen	
														3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	
														3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KDO Yang Terpelihara	1 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara											
			3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO Yang Terpelihara	2 unit												
			3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Perlengkapan/peralatan Kantor Yang Terpelihara	0 Unit 75 unit/Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara											
			3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Gedung Kantor Lainnya Yang Terpelihara	0 Unit 7 unit												
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan yang dikelola menggunakan alsintan (Ma)	46.288 hektar	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung pertanian pupuk urea, NPK, herbisida, insektisida dan alsintan (mesin parat)	0 Laporan 1 Paket										
												3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kestabilan dan Kelestarian SDG Hewar/Tanaman	Jumlah SDG Hewar/Tanaman yang Dilakukan Pelesterian dan Pemukiman Tersedianya bibit/benih (padi, cabe, tomat, kakao, Cengkeh, Pala dan Kopi)	0 VUS 1 paket			
												3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewar/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewar/Tanaman Tersedianya Pupuk dan herbisida Perkebunan	0 Dokumen 1 paket			
												3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Bibit temak sapi dan kambing Jumlah Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 paket 0 Ekor			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ker.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Kebijakan Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton			
							Luas Lahan Hijaun pakan ternak yang berkualitas (Ha)	1.5 Ha			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	60 persen	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Luas areal teraeri ligasi	0 Dokumen	150 Ha		
						3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	1 dokumen		
						3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Bangunan, Coolbox, pisau potong dan talenan	2 paket	0 Unit		
							Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipehara				
						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipehara	0 Unit	1 unit		
							UPPO(unit pengolahan pupuk organik)				
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Berpenyakit	10 persen	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Obat/Vaksin	0 Laporan	1 paket		
						3.27.04.2.02.03 Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	4 orang		
						3.27.04.2.03.02 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	200 ekor		
							Jumlah ternak sapi yang diinseminasi				
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Areal yang terserang OPT menurun (Ha)	45 hektar	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hand sprayer Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Mesin paras Mesin sensor kedel Pestisida	45 unit 0 Ha 45 unit 20 unit 925 liter			
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	70 persen	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Dasar/teknis	0 Unit	68 orang		
						3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Demplopt pangan alternatif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	71 Demplopt	0 Unit		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan Konservasi SDA	100 Persen	3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		3.28.04.2.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	0 Ha	0 Ha		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan	100 Persen		
						3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang di ikuti/dilaksanakan	5 Kali	Semua Kab/Kota		
						3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bin	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan	5 dij	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	23 Kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						3.30.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit 1 Unit 1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/ur yang diadakan	2 unit	Semua Kab/Kota		
						3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 uj	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
						3.30.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 uj			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 Persen		
							3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 Persen		
							3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah /Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	23 u/j		
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang terpelihara	1 unit		
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan penataan pasar rakyat	20 persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI MARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan bahan pokok penting lainnya yang dipasar murahkan	20 persen	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah menjelang HKBN	2 kali		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	60 Lembar		
							3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk yang disalurkan	1651650 kg	Semua Kab/Kota	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan Konsumen	20 persen	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah layanan tera-tera ulang pada alat UTPP	100 unit/Usaha pengawasan peredaran barang dan jasa		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi	25 persen	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah komoditi agro yang diluncurkan dalam promosi pasar dan pasar lelang	1 orang		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase standar kompetensi industri	22 persen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Jumlah Draft Dokumen Ranperda RPIK	1 Dokumen 1 Dokumen		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM industri kecil dan menengah yang dibina dan difasilitasi mutu produk IKM	30 orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Warga Transmigrasi Yang Terlatih	104 persen	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Jumlah Warga Transmigrasi Yang Mendapatkan Bantuan Alat Pertanian	0 satuan permukiman 20 orang	3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Jumlah Warga Transmigrasi Yang Mendapatkan Bantuan Alat Pertanian	0 Satuan Permukiman 20 Orang		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah LKIP Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	0 Laporan 35 DOKUMEN		
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan 35 OPD		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
							4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Tugas ASN	12 Bulan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Kebijakan Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas Yang Di Adakan Jumlah pakalan yang diadakan Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan Presentase Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51 Pasang 24 Pasang 0 Paket 1 Paket 13 Pasang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undanga Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang 10 ORANG 12 orang 5 orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Presentase layanan Administrasi Perkantoran Presentase penyediaan jasa perkantoran Presentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Paket 5 UNIT 150 Jenis 100 Persen 12 Bulan 5 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket 12 Bulan		
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 Paket 12 Bulan		
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Presentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis 4000 JENIS 2 Jenis 0 Paket 12 bulan 12 Bulan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Orang 0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase penyediaan Administrasi Perkantoran dan Rapat Koordinasi/Konsultasi Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhnya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0 Laporan 30 KALI 48 Kali 100 Persen 12 Bulan 100 Persen 12 bulan 12 Bulan 12 BULAN	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 UNIT 2 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Adakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota	
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang diadakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Yang di adakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Presentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit 3 Unit 6 UNIT 4 unit 0 Unit 3 Unit 5 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 0 Unit 5 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan
					4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	
			4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
					4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	
					4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Tenaga harian Lepas	0 Laporan 6 Orang 12 Bulan 1 Tahun 6 ORANG 6 Orang 100 Persen 12 Bulan 6 orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara
			4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KDO dan jabatan yang terpelihara Jumlah KDO dan jabatan yang terpelihara Jumlah KDO yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Tahun 4 Unit 4 UNIT 3 unit 0 Unit 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun dan Pajak Kendaraan	Kab. Bolaang Mongondow Utara
					4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	0 Unit 1 Tahun	
					4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 6 Unit 4 UNIT 9 Unit 12 Unit 10 unit 6 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara
					4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	
					4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	
					4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Yang Terpelihara Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 4 Unit 1 Tahun	
					4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	
			4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan 1 Tahun	
					4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket 1 Tahun	
					4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	
					4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	
			4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0 Paket 12 Bulan	
					4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0 Paket 12 Bulan	
					4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota
			4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kefembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Laporan		
						4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0 Dokumen 35 OPD		
						4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Implementasi SAKIP	0 Dokumen 35 OPD		
			4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan		
						4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Tahun 0 Laporan		
						4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Kecamatan yang dimekarkan Jumlah Rakor FORKOPIMDA yang dilaksanakan	0 Dokumen 1 Kecamatan 12 Bulan		
						4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Desa yang memiliki batas secara legal Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Desa 0 Dokumen		
						4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Nilai LPPD	0 Dokumen 3405 Nilai		
			4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Kegiatan STQ/MTQ yang Dilaksanakan/ dikuri 2. Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan yang Dilaksanakan	0 Dokumen 12 Kegiatan		
						4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Unsur Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Persentase Tempat Ibadah/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Menerima Bantuan Dana Hibah dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Sosial Keagamaan	3 Dokumen 75 Persen		
						4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Unsur Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keasipan, Transhum Linmas Jumlah Pelaksana Adat Yang Baru Persentase Lembaga Adat Aktif	0 Dokumen 137 Orang 100 Persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen		
						4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Hukum yang di Fasilitasi Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus 0 Kasus		
						4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Produk Hukum yang di Fasilitasi	0 Dokumen 600 Dokumen		
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 Dokumen 0 Laporan		
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sinkronisasi Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dibidang Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 Dokumen 2 BUMD		
						4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah rapat koordinasi hasil money TPID yang dilaksanakan	0 Laporan 4 Laporan		
						4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah money dan fasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi mikro kecil	0 Dokumen 24 Kali		
						4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah BLUD aktif yang di bentuk Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 BLUD 0 Dokumen		
						4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah BUMD aktif yang di dirikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 BUMD 0 Dokumen		
			4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan yang dilaksanakan	0 Dokumen 4 Dokumen		
						4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan yang dilaksanakan	0 Laporan 4 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi hasil Money EPRA yang dilaksanakan	0 Laporan 4 Kegiatan		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	0 Dokumen 4 Laporan		
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	0 Dokumen 4 Laporan		
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dibidang energi dan air	0 Dokumen 4 Laporan		
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PEKUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memenuh Cakupan Deomuen Penyusunan Perencanaan PD	100 %		
							4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memenuh Cakupan Dokumen Penyusunan RKA SKPD	100 %		
							4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memenuh Cakupan Dokumen Penyusunan RKA SKPD	100 %		
							4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Memenuh Cakupan Koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan Dokumen DPA SKPD	100 %		
							4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	100 %		
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Memenuh Cakupan Dokumen/Laporan yang dihasilkan	100 %		
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedia Gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 14 Bulan		
							4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan pelaksanaan tugas ASN	100 %		
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100 %		
			4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kab/Kota	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	15 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/ Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah/jenis barang cetak/pengadaan yang diadakan	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintah Daerah				4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit 1 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keukuran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	100 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat		100 %		
						4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		100 %		
						4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100 %		
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		100 %	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KDO yang terpelihara		4 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO yang terpelihara		18 Unit		
						4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100 %		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		0 Orang/Bulan		
							terbayarnya gaji dan tunjangan anggota DPRD		20 orang		
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		20 Paket		
						4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan Layanan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		100 %		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 Orang		
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		100 %		
						4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan koordinasi dan konsultasi		100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5 prodak		
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 prodak		
						4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		0 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		5 dokumen		
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		0 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		5 dokumen		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAAS		0 Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							Jumlah rapat AKD pembahasan yang difasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna		5 kali		
							Jumlah rapat-rapat paripurna		5 kali		
						4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							Jumlah rapat AKD pembahasan yang difasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna		5 kali		
							Jumlah rapat-rapat paripurna		5 kali		
						4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							Jumlah rapat AKD yang difasilitasi Pelaksanaan rapat-rapat paripurna		5 kali		
							Jumlah rapat-rapat paripurna		5 kali		
						4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		5 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
						4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 Dokumen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							Jumlah Rapat AKD pembahasan yang difasilitasi		1 kali		
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi		12 kali		
						4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi presentasi penyediaan jasa perkantoran		12 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
									100 persen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Est.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi Presentase penyediaan jasa perkantoran	12 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi Presentase penyediaan jasa perkantoran	12 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi Presentase penyediaan jasa perkantoran	12 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Pelaksanaan rapat-rapat paripurna	1 kali 1 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan presentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	6 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Presentase penyediaan jasa perkantoran	25 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase penyediaan jasa perkantoran	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui pengawasan	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kegiatan monitoring yang difasilitasi presentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	12 kali 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	pelaksanaan kegiatan reses	3 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses pelaksanaan kegiatan reses	0 Dokumen 3 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	pelaksanaan rapat-rapat AKD	1 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	7 org 7 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
5.01 PERENCANAAN											
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang administrasi keuangan	100 persen	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Presentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 persen		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 k 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 Buah	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/pengadaan yang diadakan	10 Dok/jenis	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	60 kali	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 Persen	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	14 buah	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 persen		
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 persen		
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga Administrasi)	0 Laporan 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah	100,00 persen	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPIPD/RPIMD/RKPD) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	0 Dokumen 3 Dokumen		
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase doktenda yang disusun melalui pengembangan IT	100 Persen	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT yang dikembangkan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 aplikasi 0 Dokumen		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	88 Persen	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Jumlah kerjasama yang dikembangkan dalam rangka penganekaragaman data	0 Kerja Sama 1 Kerjasama		
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan berkala pelaksanaan dokumen yang disusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan 0 Laporan		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase capaian kinerja SKPD	75 Persen	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75 Persen	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah esistensi penyusunan dokumen SKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 kegiatan 0 Laporan		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian dan SDA	85 Persen	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPIPD, RPIMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD) Jumlah Dokumen sektoral bidang perekonomian yang disusun	0 Dokumen 1 dok		
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen SKPD bidang perekonomian yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 kegiatan 0 Laporan		
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPIPD, RPIMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Sektoral bidang SDA yang disusun	0 Dokumen 1 dok		
							5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sektoral bidang SDA yang disusun Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPIMD pada Bidang SDA	1 dok 0 Laporan		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	80 persen	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIPD, RPIMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD) Jumlah Dokumen sektoral bidang infrastruktur yang disusun	0 Dokumen 1 dok		
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusunnya dokumen renja dan renja perubahan	0 Dokumen 10 dokumen		
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meningkatnya pemahaman aparat terhadap perjanjian kinerja	0 Laporan 90 persen		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 persen		
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD persentase SPM yang diajukan lengkap dengan dokumen pendukungnya	0 Dokumen 100 persen		
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah peserta di bidang pengelolaan keuangan	0 Orang 70 orang	Semua Kab/Kota	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket 90 bulan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu kategori penilaian tamu terhadap pelayanan BPKD	0 Laporan 4 poin	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase undangan rakor dan konsultasi yang dihadiri	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keuaran Kegiatan	Target Capaian				Keuaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase dokumen wajib bermeterai yang memiliki legalitas	0 Laporan 100 persen		
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tuaran rekening listrik terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan		
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terpeiharanya kebersihan kantor	0 Laporan 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpeihara	0 Unit 1 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan roda empat operasional atau lapangan yang terpeihara	0 Unit 2 unit		
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeiharanya peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 20 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi persentase ruang kerja sesuai standar kelayakan dan kenyamanan kerja	0 Unit 80 persen		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas maksimal defisit APBD Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD Kualitas penyajian Laporan Keuangan Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting	5 Persen 2 poin 100 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen	5.02.02.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0 Dokumen		
							5.02.02.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen		
							5.02.02.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen		
							5.02.02.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen		
				5.02.02.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah persentase dokumen spm yang sesuai kode rekening	0 Dokumen 100 persen		
							5.02.02.02.03 Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD persentase CPD yang menyusun anggaran kas sesuai sumber dana	0 Dokumen 100 Persen		
							5.02.02.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) persentase SP2D yang potongan PFK sesuai	0 Laporan 100 persen		
							5.02.02.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Persentase hasil rekonsiliasi yang diundaklanjuti	0 Dokumen 100 Persen		
							5.02.02.02.11 Pembinaan Penatrusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SPD yang terbit sesuai dengan sumber dana	100 Persen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	0 Dokumen 100 persen		
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi persentase OPD yang menyajikan informasi secara peruh	0 Laporan 100 persen		
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LKPD yang dibuat Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20 dokumen 0 Dokumen		
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	0 Dokumen 2 poin		
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	35 opd 0 Orang		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perijinan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pinjaman pemerintah daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perijinan Pinjaman Pemerintah Daerah	10 dokumen 0 Laporan		
							5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan persentase usulan dana oleh objek penerima bantuan yang dilakukan kajian	1 Laporan 100 Persen		
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak persentase usulan dana oleh objek penerima BTT yang direalisasikan	0 Laporan 100 Persen		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas	91 Persen 91 Persen 91 Persen 100 Persen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun persentase SSH yang tersedia dalam simda integrasi	0 Dokumen 100 persen		
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah persentase OPD yang menyusun perencanaan kebutuhan BMD	0 Dokumen 100 persen		
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah OPD/unit yang dibimbing melakukan updating KIB dan KIR	0 Laporan 55 unit		
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD dengan baik	0 Laporan 55 unit		
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah persentase aset tanah dan bangunan pemda yang tersertifikasi	0 Laporan 95 persen		
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah persentase BMD yang tidak ekonomis yang dilakukan penilaian	0 Laporan 95 persen		
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah persentase pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	0 Dokumen 100 persen		
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	0 Laporan 100 persen		
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah laporan BMD yang disusun	0 Laporan 10 eks		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	70 Persen 75 Persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah jumlah objek pajak baru yang direncanakan	0 Dokumen 35 orang/jam		
							5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.04.2.01.03 Penyukuhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyukuhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah persentase wilayah WP yang dilakukan penyukuhan/pembinaan	0 Laporan 100 persen		
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang terdaftar	0 Laporan 38 WP		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah persentase basis data pajak daerah yang update	0 Laporan 60 persen		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah persentase piutang pajak dilunasi	0 Dokumen 20 persen		
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah persentase wajib pajak dan retribusi yang menuntikan kewajibannya tepat waktu	0 Laporan 90 persen		
5.03 KEPEGAWAIAN											
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 persen		
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan pelaksanaan tugas ASN	100 persen		
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 pasang 0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56 orang 0 Orang		
							5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti/dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 kegiatan 0 Orang	Semua Kab/Kota	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	30 u/j	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan	4 d/j	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	65 kegiatan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit 0 Unit	Semua Kab/Kota	
							5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 u/j 0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 persen		
							5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen		
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi/dipelihara	1 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	persentase kebutuhan pegawai dan pengembangan karir pegawai	100 Persen	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase updating data kepegawaian	100 Persen	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0 Dokumen	Jumlah kebutuhan ASN yang disetujui	310 orang		
							5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 paket	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Laporan		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan PNS	100 Persen	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang naik pangkat tepat waktu	100 persen				
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0 Dokumen	Jumlah penempatan ASN berdasarkan kebutuhan	200 orang		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	100 Persen	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 Orang	Persentase ASN yang berprestasi	100 persen		
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 Orang	Persentase kasus-kasus yang diindaklanjuti	100 persen		
							5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	Persentase ASN yang melanggar disiplin	0 persen		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN berkompeten	100 persen	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang sudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	5.04.02.2.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar	14 orang	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0 Laporan		
							5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah keikutsertaan CPNS dalam pelatihan dasar tepat waktu	310 orang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Laporan		
								Jumlah pejabat fungsional yang lulus didat	10 orang	Jumlah pejabat struktural yang lulus didat	15 orang		
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah	90,00 persen	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	90 Persen	5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelembagaan dan Peraturan	Jumlah Data Kelembagaan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	Jumlah penelitian yang dihasilkan	3 Penelitian		
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang dikembangkan	100 Persen	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	Jumlah inovasi yang dikembangkan	9 RTK		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 persen		
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Pengawasan yang tersertifikasi	4 orang				
							6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti/dilaksanakan	1 kegiatan			Semua Kab/Kota	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	45 u/j	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang Cetak/ penggandaan yang diadakan	1 d/j	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/Jenis Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang diadakan	6 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							6.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100 persen				
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 persen		
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	80 persen	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				7.01.01.2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 98 Persen Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2 unit Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.05.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis dan peralatan kantor 15 unit Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 40 Buah Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan 100 Persen Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Persentase Penyediaan dan Peralatan perlengkapan kantor 99 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang Cetak/Penggandaan Yang Di Adakan 100 Persen Jumlah/Jenis Barang Cetak/Penggandaan yang diadakan 2 item Jumlah/ jenis barang cetak/ penggandaan yang diadakan 99 Persen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99 Persen Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 20 Kali Jumlah Rapat Koordinasi /konsultasi yang dilaksanakan 10 kegiatan Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang di Laksanakan 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Jabatan yang diadakan 1 Unit Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan yang diadakan 1 Unit Jumlah Kendaraan Dinas/jabatan yang di Adakan 1 Unit Jumlah Kendaraan dinas Yang diadakan 0 Unit Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan 5 Unit Jumlah Mebeleur yang diadakan 10 Unit Jumlah Mebeleur Yang Di Adakan 15 Unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit		Semua Kab/Kota	
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/ jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan 11 Unit Jumlah/Jenis Peralatan Mesin Lainnya Yang Di Adakan 5 Unit Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan 3 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana pendukung Kegiatan Kantor 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/ jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 2 Unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan Persentase ketersediaan jasa surat menyurat 99 Persen Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat 12 Bulan Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat 100 Persen			
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan persentase ketersediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik 12 Bulan Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 99 Persen Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen Persentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen			
							7.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan kantor 100 Persen Terpenuhnya Jasa Pelayanan Umum Kantor 98 Persen Tersedianya jasa pelayanan umum 7 orang Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan		Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit persentase kendaraan dinas 100 Persen Persentase Kendaraan Dinas yang terpelihara 100 Persen Persentase Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 100 Persen		Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan Mesin Lainnya yang Terpelihara Persentase Peralatan Mesin Lainnya Yang Terpelihara Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 0 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 5 unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Yang Di Rehabilitasi/Dipelihara Jumlah Gedung yang direhabilitasi/dipelihara persentase Gedung /Bangunan yang terpelihara Persentase Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung akantor	0 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Gedung 100 Persen		
	7.01.03 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Pelayanan	0 Dokumen 2 laporan		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelayanan Persentase kegiatan pemerintahan Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan	0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan 95 Persen 1 Kegiatan 98 persen		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KURUHAN	Presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Presentase fasilitas pemberdayaan desa	99 Persen 99 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat waktu Terlaksananya Musyawarah Pembangunan desa Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya musyawarah pembangunan Desa	16 Desa 18 Desa 2 Kegiatan 15 Desa 22 Bulan		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penanganan laporan transtibnas	99 Persen	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kantrantribmas Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kantrantribmas Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kantrantribmas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan 12 Laporan 30 Laporan 0 Laporan		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase laporan LPPD tepat waktu Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	99 Persen 99 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas pengelolaan desa Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Hasil Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0 Bulan 16 Desa 18 Desa 20 Desa 0 Dokumen 16 Desa		
							7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 Desa 0 Laporan		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan		
							8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Semua Kab/Kota	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
							8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 LEMBAR		
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bolaang Mongondow Utara	
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami ideologi Wawasan	100 persen	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100 persen	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang		
							8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Laporan		
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan	100 persen	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemilih	100 persen	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Pendaftaran di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen		
	8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen		
								Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pencegahan miras dan narkoba	80 Orang		

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Adapun Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan diuraikan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Sedangkan plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO. (1)	URAIAN (2)	PLAFON ANGGARAN (3)	KET. (4)
1	BELANJA OPERASI	280.284.294.299,00	
1.1	Belanja Pegawai	228.484.045.698,00	
1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.853.025.749,00	
1.3	Belanja Bunga	0,00	
1.4	Belanja Subsidi	0,00	
1.5	Belanja Hibah	6.947.222.852,00	
1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
2	BELANJA MODAL	77.943.951.359,00	
2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.943.951.359,00	
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.004.522.067,00	
4	BELANJA TRANSFER	37.204.454.459,00	
4.1	Belanja Bagi Hasil	928.537.091,00	
4.1	Belanja Bantuan Keuangan	36.275.917.368,00	
	TOTAL BELANJA	396.437.222.184,00	

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp.0.00.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	0,00	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

BAB V PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 setelah disepakati antara Bupati dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pergeseran rincian belanja, penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Boroko, 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



Depri Pontoh
DEPRI PONTOH

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	79.643.664.646	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.643.664.646	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.643.664.646	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.748.042.229	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.666.349.589	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.641.570.909	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.778.680	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	392.231.400	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	392.231.400	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.000.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476.748.000	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	43.000.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.200.000	
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	369.548.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.073.240	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.057.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.016.240	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.640.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.140.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.895.622.317	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.493.832.617	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	100	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	206.235.080	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	100	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	100	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	171.875.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	323.750.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	212.992.900	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	578.977.937	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	432.877.300	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	100	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	100	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	100	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	100	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	100	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	100	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	196.875.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	236.000.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	590.113.600	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	100	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	100	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	105.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	113.112.500	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	372.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	378.798.800	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	123.798.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	255.000.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	78.720.777.620	
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	78.720.777.620	
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	63.055.230.016	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.768.969.335	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.069.446.582	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.045.446.582	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.911.300	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.955.300	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.956.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.536.301	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	101.372.565	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.163.736	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.850.452	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.750.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.560.600	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.176.116	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.363.736	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.224.700	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.107.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.917.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.477.511.004	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.636.033.943	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	356.209.111	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	208.000.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.000.000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	225.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	121.824.832	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	200.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.701.477.061	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.005.164	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	56.913.426	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.500.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	43.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	205.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.465.921	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	47.043.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.000.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	32.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	327.031.500	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	205.240.680	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	658.620.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.000.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	250.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	170.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	68.000.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60.656.620	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	140.000.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	85.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	55.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.630.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.630.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.500.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	130.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	38.000.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	140.749.677	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.713.785	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.713.785	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.677.722	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	49.677.722	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.358.170	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.358.170	
1.02.0.00.0.00.01.0002	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD).	11.367.330.600	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.536.330.600	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.320.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.972.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.348.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.592.300	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.964.300	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.628.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.418.300	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.418.300	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.231.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.931.000.000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	556.000.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	500.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.500.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	200.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.600.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.600.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.600.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS SANGKUB	337.914.475	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.914.475	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.256.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.559.375	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.340.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.219.375	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	156.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	156.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS BINTAUNA	337.852.475	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.102.475	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.838.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.382.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.165.375	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.340.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.825.375	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.750.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS BOHABAK	312.330.125	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.080.125	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.456.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.525.025	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.005.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.520.025	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	149.250.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.250.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.250.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS BOLANGITANG	316.255.425	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.505.425	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.300	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.300	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.950.025	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.340.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.610.025	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	144.750.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS TUNTUNG	279.672.675	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.172.675	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.848.500	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.392.500	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.225.075	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.203.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.022.075	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	112.500.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	112.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI	280.869.675	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.869.675	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.043.500	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.587.500	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.727.075	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.137.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.740.075	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	111.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS OLOT	275.972.025	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.222.025	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.456.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.666.925	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.137.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.529.925	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	105.750.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	105.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS MOKODITEK	281.725.625	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.225.625	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.752.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.296.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.374.525	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.071.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.603.525	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	111.500.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS SANGTOMBOLANG	284.880.475	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.880.475	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.051.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.595.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.730.375	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.472.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.258.375	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS BUKO	298.445.975	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.695.975	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.861.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.405.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.735.875	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.340.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.395.875	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.750.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS BOROKO	299.532.175	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.782.175	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.529.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.073.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.154.075	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.807.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.347.075	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.750.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS BIONTONG	292.086.175	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.086.175	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.752.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.296.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.235.075	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.472.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.763.075	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.099.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.809.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	495.019.675	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	302.019.675	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.947.400	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.589.400	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.358.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.473.175	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.690.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.083.175	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.599.100	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.309.100	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	193.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	93.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	THERAPEUTIC FEEDING CENTRE	205.660.029	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.660.029	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.597.654	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.386.654	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.655.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.556.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.772.375	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.121.500	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.650.875	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	116.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	56.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.203.009.150	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.203.009.150	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.203.009.150	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.698.673.110	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.145.364.998	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.145.364.998	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100.000.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.000.000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680.000.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.610.000.000	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	2.400.000.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.378.111	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.378.111	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.930.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.000.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.930.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	60.000.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	749.600.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	180.000.000	
1.03.02.2.01.48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	25.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	524.600.000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	25.000.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	50.000.000	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	93.600.000	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	156.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	842.536.040	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	842.536.040	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	25.000.000	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	46.800.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	50.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100.000.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	370.736.040	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	100.000.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	125.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100.000.000	
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	25.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	221.800.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	221.800.000	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	46.800.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50.000.000	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	100.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	146.800.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	146.800.000	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	46.800.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	150.000.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	200.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	200.000.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	20.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	231.200.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	231.200.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	31.200.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.368.800.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.368.800.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	50.000.000	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	50.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	200.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	250.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	250.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.000.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	200.000.000	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	268.800.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	193.600.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	93.600.000	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	93.600.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	275.000.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.933.600.594	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.933.600.594	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.933.600.594	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.781.787.565	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.932.828.685	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.932.828.685	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.500.000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.500.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.000.000	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.458.880	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.458.880	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	42.578.258	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.289.129	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.289.129	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	21.289.129	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	21.289.129	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	42.578.258	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	21.289.129	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	21.289.129	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	21.289.129	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	21.289.129	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	66.656.513	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	66.656.513	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	66.656.513	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.232.128.031	
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.688.619.726	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.688.619.726	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.974.518.526	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.762.963.816	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.762.963.816	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.491.710	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.819.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.717.800	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.954.410	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.773.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.523.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.250.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.280.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.800.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.432.411.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.432.411.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.432.401.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	10.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	281.690.200	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	281.680.200	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	281.680.200	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.000	
1.05.0.00.0.00.02.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.543.508.306	
1.05.0.00.0.00.02.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.543.508.306	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.476.619.621	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.094.792.578	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.094.792.578	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.528.400	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.184.600	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.159.200	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.184.600	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.124.300	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.337.500	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.786.800	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.174.343	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.230.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.944.343	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	66.888.685	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35.000.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	21.888.685	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.944.342	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.944.343	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.164.661.642	
1.06.0.00.0.00.01.00	DINAS SOSIAL	3.164.661.642	
1.06.0.00.0.00.01.00	DINAS SOSIAL	3.164.661.642	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.748.661.642	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.176.544.039	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.176.544.039	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.612.270	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.612.270	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.057.600	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.557.600	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.170.000	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.670.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.567.733	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.002.253	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.565.480	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.710.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.660.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	101.000.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	111.500.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	99.500.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	75.000.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	12.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.500.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12.000.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	5.000.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.000.000	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	153.500.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	153.500.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	68.500.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	35.000.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	15.000.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	15.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.243.275.186	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.243.275.186	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.243.275.186	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.155.386.766	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.798.576.014	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.798.576.014	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.150.200	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.351.800	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.345.600	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.452.800	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.070.000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.070.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.089.552	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.358.162	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.231.390	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.501.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.630.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.870.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	87.888.420	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	87.888.420	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	87.888.420	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.000.000	
2.14.2.08.0.00.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.000.000	
2.14.2.08.0.00.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	8.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.000.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	101.000.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	99.000.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.540.040.134	
2.09.0.00.0.00.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.540.040.134	
2.09.0.00.0.00.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.540.040.134	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.197.079.103	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.847.651.403	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.847.651.403	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.142.700	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.424.500	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.718.200	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.505.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.005.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.780.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.730.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	254.767.381	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	98.561.200	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	98.561.200	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	65.370.500	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65.370.500	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	90.835.681	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	17.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	73.835.681	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	88.193.650	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	88.193.650	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	88.193.650	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	66.656.512	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.512	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	66.656.512	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	66.656.512	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	66.656.512	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	66.656.512	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.220.667.216	
2.11.3.28.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.220.667.216	
2.11.3.28.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.220.667.216	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.559.599.014	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.817.785.785	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.785.785	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.386.000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.386.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.951.149	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.219.150	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.731.999	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.886.080	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.541.920	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.344.160	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.590.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.730.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.440.000	
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	54.930.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.490.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	140.613.602	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	140.613.602	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	140.613.602	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	54.907.800	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9.916.400	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9.916.400	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9.916.400	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	9.916.400	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35.075.000	
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	35.075.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9.948.100	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.948.100	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	9.948.100	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.030.500	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.030.500	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.030.500	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.405.568.200	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.395.654.800	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.395.654.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	9.913.400	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	9.913.400	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.078.620.848	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.078.620.848	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.078.620.848	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.978.620.848	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.274.857	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.135.274.857	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.600.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.100.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.108.081	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.213.481	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.919.600	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.975.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.346.750	
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.846.750	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.500.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.861.160	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.853.040	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.008.120	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.430.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.720.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.710.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.000.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.000.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.182.424.625	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.182.424.625	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.182.424.625	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.291.001.626	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.528.238.842	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.528.238.842	
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	26.400.000	
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.400.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.156.484	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.049.600	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.536.700	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.735.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.835.184	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.500.000	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.500.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.926.300	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.139.500	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.786.800	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.780.000	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.780.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	782.242.999	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	782.242.999	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14.150.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.110.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	65.183.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30.500.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	656.999.999	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	300.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	109.180.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	109.180.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	62.200.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.230.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	34.750.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.446.502.917	
2.14.2.08.0.00.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.446.502.917	
2.14.2.08.0.00.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.446.502.917	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.174.502.917	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.355.119.150	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.355.119.150	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.165.800	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.174.800	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.491.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.475.711	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.475.711	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.400.680	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.835.200	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.565.480	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.341.576	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.841.576	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	9.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5.000.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	2.000.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	255.500.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.500.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.500.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	240.000.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	240.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.500.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.500.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2.500.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.500.000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.500.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.500.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.500.000	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2.500.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.500.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.500.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.021.001.432	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	3.021.001.432	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	3.021.001.432	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.444.599.912	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.580.846.022	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.580.846.022	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.500.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.521.490	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.021.490	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.000.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.232.400	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.232.400	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.000.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.500.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	576.401.520	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	197.000.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	197.000.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	20.000.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	225.508.120	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	15.500.000	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	210.008.120	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.893.400	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.893.400	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.662.533.836	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.662.533.836	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.662.533.836	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.347.592.836	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.948.101	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.758.948.101	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.767.600	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.267.600	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.001.000	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.606.135	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.618.155	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.022.500	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.565.480	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.270.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	188.941.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.941.000	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	24.672.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	26.349.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	11.920.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	26.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	126.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	126.000.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	11.000.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100.000.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	15.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	50.000.000	
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	50.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	12.000.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	12.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	15.000.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	15.000.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	15.000.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	23.000.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	23.000.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	23.000.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.674.376.105	
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.674.376.105	
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.674.376.105	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.314.376.105	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.755.933.345	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.731.155.345	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.778.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.732.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.732.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.000.000	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.450.760	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.450.760	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.260.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.570.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.690.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	70.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	60.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	30.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	80.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.000.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.580.691.226	
2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.580.691.226	
2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.580.691.226	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.161.312.013	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.613.219.143	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.613.219.143	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.750.000	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.750.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.173.250	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.183.850	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.810.600	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.178.800	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.789.620	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.560.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.180	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.229.440	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.380.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.280.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	189.129.213	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	189.079.214	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	41.769.800	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	97.309.414	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	49.999	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	230.250.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	118.543.600	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	113.543.600	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.656.400	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	11.656.400	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	15.763.181	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15.763.181	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15.763.181	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	15.763.181	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.763.181	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.763.181	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	683.659.700	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	683.659.700	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	683.659.700	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	397.983.600	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	308.250.200	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	195.750.200	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	112.500.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.733.400	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	89.733.400	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	112.500.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	112.500.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	173.176.100	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	173.176.100	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	173.176.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	100	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.500.000	
2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1.500.000	
2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1.500.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.500.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	500.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	500.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.296.999.580	
2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2.296.999.580	
2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2.296.999.580	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.499.580	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.788.071.134	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.788.071.134	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.084.281	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.295.000	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.429.281	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.360.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.344.165	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465.344.165	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	500.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	500.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	500.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	500.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	500.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	500.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.109.556.847	
3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.109.556.847	
3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.109.556.847	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.541.302.912	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.861.267.544	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.699.038.104	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.229.440	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.001.000	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000	
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.000.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.001.000	
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.000.000	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.033.368	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.516.688	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.788.680	
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.728.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	284.127.092	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.127.092	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.127.092	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	184.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	284.126.093	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	284.126.093	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	284.126.093	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	750	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	750	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	750	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.559.925.331	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	3.559.925.331	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	3.559.925.331	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.067.550.468	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.128.692.670	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.128.692.670	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.673.000	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.255.000	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.568.000	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.589.799	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.802.999	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.786.800	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.594.999	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.615.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.999.999	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	225.158.263	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.057.400	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.057.400	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.100.863	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.100.863	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	267.216.600	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	267.216.600	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	267.216.600	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	9.335.285.868	
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN	9.335.285.868	
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN	9.335.285.868	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.005.165.455	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.148.151.682	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.148.151.682	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.135.800	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.135.800	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.370.375	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.210.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.152.775	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.206.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.750.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.051.600	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.532.598	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.303.158	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.229.440	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.975.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.305.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.790.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.380.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	481.017.359	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	130.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	130.000.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	167.557.360	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	117.557.360	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	50.000.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	183.459.999	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	163.459.999	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20.000.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	29.522.200	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	27.522.200	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	26.522.200	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.000.000	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	286.760.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	81.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	81.000.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	95.760.000	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.760.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	110.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.817.854	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.817.854	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.817.854	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	482.003.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	482.003.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	410.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	72.003.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.848.222.940	
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.848.222.940	
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.848.222.940	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.772.879.160	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.763.543.880	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.543.880	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.181.800	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	890.000	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.139.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.152.800	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.500.000	
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27.000.000	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.500.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.694.480	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.129.000	
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.565.480	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.959.000	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.759.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.200.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.000.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20.000.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2.500.000	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.500.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.343.780	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.343.780	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.343.780	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	15.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15.000.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	15.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	28.000.000	
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	28.000.000	
3.30.3.31.2.17.01.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	28.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	28.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	28.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	51.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	51.000.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	51.000.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	51.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	24.728.884.965	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	24.728.884.965	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	16.205.291.215	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.005.291.215	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.763.782.294	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.763.782.294	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1.500.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.038.179.680	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.038.179.680	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.264.119.412	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	366.172.776	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	797.946.636	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	272.609.829	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	122.609.829	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	200.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	200.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	200.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	200.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	5.132.052.040	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.132.052.040	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	281.680.200	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.680.200	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.170.684.000	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.550.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.600.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.750.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	995.784.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.800.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.000.000	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.800.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.631.360.640	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	513.234.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.750.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	937.376.640	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.527.200	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	354.300.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.580.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.028.647.200	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	190.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	190.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.763.772.080	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.122.080	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peraiatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.641.650.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.641.650.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	933.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	708.600.000	
4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN HUKUM	119.372.080	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.222.080	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	50.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	150.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	150.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	50.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA	122.322.080	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.172.080	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	150.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN ORGANISASI	119.272.080	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.272.080	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	50.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	200.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	327.722.080	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.172.080	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	205.550.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	205.400.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	205.200.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	50.000	
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	50.000	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	50.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	150.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	615.550.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.450.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	500.100.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	500.100.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	500.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	210.215.480	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.215.480	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.565.480	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.565.480	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	50.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50.000	
4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	113.315.830	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.165.830	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.750	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.750	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.672.080	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.672.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	150.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	150.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	50.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	19.263.090.855	
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	19.263.090.855	
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	19.263.090.855	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.375.084.855	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	150.000.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	140.000.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.416.639.086	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.291.860.406	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.778.680	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.826.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117.826.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.253.308.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	252.050.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.360.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.898.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.594.835	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	109.674.335	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.919.500	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.282.248	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.100.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.902.804	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.902.804	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967.376.640	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.340.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	364.700.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.380.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.600.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.660.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.206.086.686	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.943.586.686	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	82.500.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	180.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.661.008.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.261.008.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	400.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	888.006.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	95.000.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	25.000.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	25.000.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	20.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	115.000.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	25.000.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	25.000.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	20.000.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	130.000.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20.000.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20.000.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20.000.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	25.000.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	20.003.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	20.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28.002.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	28.000.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.000	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	500.000.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	500.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	5.320.753.350	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.320.753.350	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.320.753.350	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.710.210.648	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.391.767.456	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.391.767.456	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.014.312	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135.014.312	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.458.880	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.458.880	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.970.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.970.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.150.000.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	600.000.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	150.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	460.542.702	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	200.000.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	160.542.702	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	160.542.702	
5.02	KEUANGAN	77.230.673.606	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.230.673.606	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	77.230.673.606	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.043.997.080	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.753.600	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.753.600	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.043.539.900	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.986.152.700	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.387.200	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.148.000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.384.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.072.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.192.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.719.980	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.719.980	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.835.600	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.980.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.090.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.320.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.445.600	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	39.234.676.526	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	328.000.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.000.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	115.000.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	98.000.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	281.000.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	65.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	120.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	96.000.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	416.700.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	35.000.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.700.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	50.000.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	65.000.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.000.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	38.208.976.526	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	37.204.454.459	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.004.522.067	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	409.000.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	409.000.000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	25.000.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	80.000.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	35.000.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	169.000.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	50.000.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15.000.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10.000.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	543.000.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	543.000.000	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	105.000.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	80.000.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	75.000.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.000.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	105.000.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	35.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	33.000.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	3.769.721.984	
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.769.721.984	
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.769.721.984	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.490.473.184	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.976.444	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.976.444	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.685.000	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.685.000	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.996.300	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.530.600	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.022.500	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.125.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.318.200	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.255.440	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.132.600	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.122.840	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.560.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.280.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.200.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	279.248.800	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	45.000.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	145.914.300	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.134.800	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	20.779.500	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	88.334.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	23.163.500	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	40.000.000	
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	25.171.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.649.999.500	
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.649.999.500	
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.649.999.500	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.649.999.500	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.649.999.500	
5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	100.000.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.549.999.500	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	500.000.000	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	500.000.000	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	500.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	500.000.000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	250.000.000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	250.000.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250.000.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	250.000.000	
6 ;	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	4.914.027.007	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	4.914.027.007	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	4.914.027.007	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.241.049.107	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.006.393.816	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.006.393.816	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.012.400	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.390.800	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.621.600	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.381.725	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.077.825	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.796.400	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.507.500	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.500.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.961.166	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.870.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.083.046	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.008.120	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.800.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.860.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.940.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	492.002.500	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	368.243.400	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	18.243.400	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	50.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	100.000.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	50.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50.000.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	123.759.100	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	91.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	32.759.100	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	180.975.400	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	170.975.400	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.975.400	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	13.214.203.490	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN SANGKUB	2.449.374.370	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN SANGKUB	2.449.374.370	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.449.374.370	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.126.926.024	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.126.926.024	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.641.880	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.641.880	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.306.466	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.413.066	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.893.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.500.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BINTAUNA	3.710.861.636	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BINTAUNA	3.710.861.636	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.710.860.636	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.955.040.454	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.955.040.454	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.359.950	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.090.450	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.350.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.919.100	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.643.723	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.640.723	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.176.834	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.637.394	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.039.440	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.639.675	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.180.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.459.675	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR	2.163.834.438	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR	2.163.834.438	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.163.834.438	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.869.171.055	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.869.171.055	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.115.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.115.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.494.443	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.494.443	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.336.040	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.336.040	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.717.900	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.717.900	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	1.477.728.415	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	1.477.728.415	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.477.727.415	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.185.475.148	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.185.475.148	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.301.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.300.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	498.507	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	495.507	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.450.760	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.450.760	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.002.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN KADIPANG	1.407.429.652	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN KADIPANG	1.407.429.652	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.407.429.652	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.132.542.853	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.542.853	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.988.399	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.987.399	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.893.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.893.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.002.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000	
7.01.0.00.0.00.06.00	KECAMATAN PINOGALUMAN	2.004.974.979	
7.01.0.00.0.00.06.00	KECAMATAN PINOGALUMAN	2.004.974.979	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.984.625.793	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.473.033	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.715.473.033	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.700.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.700.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.450.760	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.450.760	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.349.186	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.349.186	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.349.186	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.137.322.261	
8.01.8.01.8.01.01.0000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.137.322.261	
8.01.8.01.8.01.01.0000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.137.322.261	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.155.099.733	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.052.553.676	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	955.660.276	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.893.400	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.616.057	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.916.057	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.930.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.930.000	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	35.000.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	35.000.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.000.000	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.947.222.528	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.947.222.528	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.947.222.528	